

**HUBUNGAN PEMAHAMAN MATERI POLITIK DENGAN BUDAYA
DEMOKRASI SISWA di SMA NEGERI 5 DEPOK**

KHOIRIAH SAFITRI

4115082055



**Skripsi ini ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan gelar
sarjana pendidikan**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN**

JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2012

ABSTRAK

KHOIRIAH SAFITRI. Hubungan Pemahaman Materi Politik dengan Budaya demokrasi Siswa pada Kelas XI di SMAN 5 Depok, Jalan Ry. Bukit Rivaria-Sawangan Depok. Skripsi. Jakarta : Program Studi PKN Jurusan Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta, Mei 2012. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data empiris tentang hubungan pemahaman materi politik dengan budaya demokrasi siswa pada kelas XI di SMAN 5 Depok. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret sampai Mei 2012.

Penelitian ini menggunakan metode korelasional dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan sample yaitu teknik *simple random sampling*, jumlah sampel sebanyak 40 orang siswa. Instrument yang dilakukan dalam penelitian ini untuk variable X (Pemahaman Materi Politik) dengan test pilihan ganda, sedangkan untuk variable Y (Budaya Demokrasi) menggunakan angket skala perilaku.

Hasil uji persyaratan analisis mencari persamaan regresi $\hat{Y} = a + bX$ menunjukkan persamaan, $\hat{Y} = 43,64 + 1,580X$, selanjutnya uji kenormalan menggunakan rumus lilliefors dan diperoleh L_{hitung} variable (X) adalah 0,124 dan L_{hitung} variable (Y) adalah 0,112. L_{tabel} yang diperoleh dengan $n = 40$ dan $(\alpha=0,05)$ adalah 0,140 Karena $L_{hitung} < L_{tabel}$ maka dapat disimpulkan bahwa data kedua variable berdistribusi normal. Penelitian selanjutnya melakukan uji hipotesis, untuk keberartian regresi di peroleh F_{hitung} sebesar $19,15 > F_{tabel (0,05: 1/38)} = 4,10$, sehingga dapat disimpulkan bahwa arah regresi signifikan. Sedangkan uji kelinieran regresi menghasilkan F_{hitung} $1,70 < F_{tabel (0,05:10/28)} = 2,19$, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi linier. Uji koefisien *product moment* menghasilkan $r_{xy} = 0,579$, kemudian dilanjutkan dengan uji-t signifikansi koefisien korelasi dengan uji-t hasil yang diperoleh t_{hitung} sebesar 4,38, sedangkan t_{tabel} dengan $(\alpha=0,05)$ dk sebesar $(n-2=38)$ t_{tabel} sebesar 1,68. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa t_{hitung} $4,38 > t_{tabel}$ 1,68. Untuk uji koefisien determinasi yaitu sebesar 0,3351. Ini menunjukkan bahwa pemahaman materi politik dipengaruhi oleh budaya demokrasi siswa sebesar 33,51%. Maka dapat diambil kesimpulan terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Pemahaman Materi Politik dengan Budaya demokrasi yaitu terima H satu dan tolak H nol. Penelitian ini membawa implikasi yaitu bahwa untuk meningkatkan Budaya Demokrasi terhadap siswa SMAN 5 DEPOK, dapat dilakukan dengan meningkatkan Pemahaman tentang Materi Politik.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Dekan Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Jakarta

Drs. Komarudin, M.Si

NIP. 19640301.199103.1.001

TIM PENGUJI

No.	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1.	<u>Dr. Hj. Etin Solihatin, M.Pd.</u> Ketua
2.	<u>Dra. Dias Pudyastuti</u> Sekretaris
3.	<u>Prof. Dr. Nadiroh, M.Pd</u> Pembimbing I (Anggota)
4.	<u>Yasnita Yasin, S.Pd, M.Si</u> Pembimbing II (Anggota)
5.	<u>Yuyus Kardiman, M.Pd.</u> Penguji Ahli

Tanggal Lulus :

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan
Semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
Telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : KHOIRIAH SAFITRI

No. Registrasi : 4115082055

TandaTangan :

Tanggal :

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KHOIRIAH SAFITRI
No. Registrasi : 4115082055
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan/Fakultas : Ilmu SosialPolitik/IlmuSosial
JenisKarya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Jakarta **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non – Exclusive Royalty Free Right)** atas skripsi saya yang berjudul :

**HUBUNGAN PEMAHAMAN MATERI POLITIK DENGAN BUDAYA
DEMOKRASI SISWA di SMA NEGERI 5 DEPOK.**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikanSkripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta

Demikian pernyataan ini saya buatdengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

PadaTanggal : 20 Juli 2012

Yang Menyatakan

Khoiriah Safitri

LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Aku tahu bahwa kesuksesan tidak datang dengan sendirinya

Ia datang jika manusia melakukan suatu usaha

Maka itu kutempuh dan kugapai suksesku dengan penuh semangat,

usaha yang keras dan do'a

Gerih payah dan keikhlasan hati akan membawa kebahagiaan yang

tiada tara

Akan kuraih semua itu demi mengejar masa gemilangku

Melalui karya inilah ku tengah menuju suksesanku.

Kupersembahkan karya ini untuk orang tuaku,

keluargaku, dosen-dosenku, guru-guruku,

sahabat yang kucintai seumur hayatku.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran ALLAH SWT, Rabb semesta alam yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik walaupun dengan banyaknya keterbatasan, hambatan serta kesulitan yang peneliti hadapi, hanya ALLAH-lah yang dapat memberi kekuatan dan pertolongan sehingga semuanya dapat peneliti atasi , tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan ALLAH SWT. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan nabi besar Muhammand SAW beserta keluarga, sahabat, serta umatnya yang setia hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Jurusan Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta. Dalam menyelesaikan skripsi ini banyak pihak-pihak yang telah membantu peneliti baik dukungan moril maupun materil. Maka, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih terutama kepada :

Drs. Komarudin Sahid, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Dr. Hj. Etin Solihatini, M.Pd, selaku Ketua Jurusan Ilmu Sosial Politik Program Studi PPKN Universitas Negeri Jakarta. Rahardjo, S.pd, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta. Prof. Nadiroh, M.Pd, selaku dosen pembimbing materi yang telah membimbing dan membantu

penulis dengan sabar sejak awal sampai skripsi ini selesai. Yasnita Yasin, S.Pd, M.Si selaku dosen pembimbing metodologi yang telah membimbing dan memberikan saran yang berarti dalam perbaikan skripsi ini.

Drs. Dede Agus Suherman, selaku Kepala Sekolah SMAN 5 SEPOK yang telah bersedia memberikan izin untuk mengadakan penelitian di sekolah ini. Ibu Dra. Hj. Laksmi Gantini, M.Si dan Ibu Rosalina, S.Pd, selaku guru Pendidikan Kewarganegaraan di SMAN 5 DEPOK yang telah banyak membantu dalam penelitian dan menyebar angket. Juga guru-guru SMAN 5 DEPOK yang banyak memberikan dukungan dan do'a dalam skripsi ini.

Keluarga kecilku (Suami dan Anakku Reagan Fathi Al-Hakim), karna cinta kasih, dukungan moril, dan semangat kalian. Sehingga Bunda bisa menyelesaikan skripsi ini. Kedua orangtua ku (Ummi dan Ayah), yang selalu mengiringi dan mencurahkan do'a dan kasih sayang sepanjang perjalanan hidupku. Adik-adikku Anis dan Liza yang telah memberikan semangat dan do'a yang tulus, sehingga skripsi ini dapat selesai. Tak lupa teman-teman seperjuangan PPKN Reg 2008 yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini. Khususnya Mutiara Annisa Fitri, Mayang Kartika Ratri, Putri Rahmasari, Layli Yunita, Widhanti Sofiani. Semangat dan do'a yang tulus dari kalian tak akan pernah ku lupakan. Sahabat dan teman-teman yang selalu ada di sampingku. Terima kasih atas support kalian.

Peneliti menyadari jika dalam proses penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun akan sangat berarti. Peneliti berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca. Ammin Allohumma Ammin.

Depok, 26 Mei 2012

Khoiriah Safitri

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR ORISINALITAS	iii
LEMBAR PUBLIKASI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Pembatasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Kegunaan Penelitian	7
BAB II KERANGKA TEORI, KERANGKA BERPIKIR, DAN PENGAJUAN HIPOTESIS	
A. Deskripsi teoretis	8
1. Pemahaman Materi Politik	8
2. Budaya Demokrasi	20
B. Kerangka Berpikir	32

	C. Perumusan Hipotesis	34
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	
	A. Tujuan Penelitian	35
	B. Metode Penelitian	35
	C. Waktu dan Tempat Penelitian	36
	D. Populasi dan Sample	36
	E. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian	37
	1. Validitas Instrument.....	43
	2. Reliabilitas Instrument.....	45
	F. Teknik Analisis Data	46
	1. Mencari Persamaan Regresi.....	47
	2. Pengujian Persyaratan Analisis.....	47
	G. Uji Hipotesis Penelitian.....	48
	a. Uji Keberartian Regresi.....	48
	b. Uji Linearitas Regresi.....	48
	c. Menghitung Koefisien Korelasi Product Moment	50
	d. Menghitung Koefisien Determinasi.....	51
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Deskripsi Data	52
	1. Pemahaman Materi Politik.....	52
	2. Budaya Demokrasi.....	53
	B. Pengujian Persyaratan Analisis	56
	1. Uji Normalitas.....	56
	2. Uji linieritas.....	57
	C. Pengujian Hipotesis	58
	D. Pembahasan Hasil Penelitian	63
	E. Keterbatasan Penelitian	65

BAB V	KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN	
	A. Kesimpulan	66
	B. Implikasi	67
	C. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA		69
LAMPIRAN-LAMPIRAN		71
RIWAYAT HIDUP		136

DAFTAR TABEL

Tabel

3.1. Kolom alternatif jawaban variabel x	38
3.2. Kolom alternatif jawaban variabel Y	39
3.3. Kisi-kisi instrument Pemahaman Materi Politik (X).....	40
3.4. Kisi-kisi instrument Budaya Demokrasi (Y).....	41
3.5. Analisa Varians Regresi Linear Sederhana.....	49
4.1. Distribusi Frekuensi Pemahaman Materi Politik	52
4.2. Distribusi Frekuensi Budaya Demokrasi	54
4.3. Distribusi Frekuensi variabel X dan Y	55
4.4. Hasil Uji Normalitas	57
4.5. Hasil Uji Linearitas Regresi.....	58
4.6. Daftar ANAVA Uji Signifikasi dan Linearitas regresi	59
4.7. Pengujian Signifikasi Koefisien Korelasi Sederhana.....	62
4.8. Interpretasi Koefisien korelasi	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar

4.1. Histogram Frekuensi Pemahaman Materi Politik	53
4.2. Histogram Frekuensi Budaya Demokrasi	55
4.3. Regresi Pemahaman Materi Politik dengan Budaya Demokrasi	61

DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran

Lampiran 1. Surat keterangan izin penelitian UNJ	71
Lampiran 2. Surat keterangan penelitian SMAN 5 DEPOK	72
Lampiran 3. Surat rekomendasi penelitian	73
Lampiran 4. Angket Uji coba validitas variabel	74
Lampiran 5. Angket penelitian validitas	89
Lampiran 6. Data hasil uji coba variabel X.....	100
Lampiran 7. Langkah perhitungan uji coba variabel X	101
Lampiran 8. Data hasil perhitungan uji validitas variabel X	102
Lampiran 9. Data Reliabilitas variabel X	103
Lampiran 10. Data Hasil Reliabilitas Variabel X.....	104
Lampiran 11. Data Hasil uji coba variabel Y	105
Lampiran 12. Langkah perhitungan uji coba variabel Y.....	106
Lampiran 13. Data hasil uji coba variabel Y	107
Lampiran 14. Perhitungan Reliabilitas variabel Y.....	108
Lampiran 15. Data hasil reliabilitas variabel Y	109
Lampiran 16. Data penelitian variabel X.....	110
Lampiran 17. Data penelitian variabel Y.....	111
Lampiran 18. Proses perhitungan menggambar grafik histogram variabel X.....	112
Lampiran 19. Proses perhitungan Menggambar grafik histogram variabel Y.....	113
Lampiran 20. Hasil data mentah variabel X.....	114
Lampiran 21. Tabel perhitungan rata-rata, varians dan simpangan baku variabel ..	115

Lampiran 22. Perhitungan rata-rata, varians dan simpangan baku.....	116
Lampiran 23. Data berpasangan Variabel X dan Y.....	117
Lampiran 24. Perhitungan Normalitas dengan Lilliefors variabel X	118
Lampiran 25. Perhitungan Normalitas dengan Lilliefors variabel Y.....	119
Lampiran 26. Perhitungan Uji Linieritas dengan Persamaan Regresi Linier.....	120
Lampiran 27. Perhitungan Uji keberartian regresi.....	121
Lampiran 28. Perhitunga Uji kelinieran regresi	122
Lampiran 29. Perhitungan JK (G)	123
Lampiran 30. Tabel ANAVA untuk uji keberartian dan kelinieran regresi.....	124
Lampiran 31. Perhitungan Koefisien Korelasi Product Moment.....	125
Lampiran 32. Perhitungan Uji Signifikasi.....	126
Lampiran 33. Perhitungan Uji Koefisien Determinasi	127
Lampiran 34. Tabel nilai r Product Moment.....	128
Lampiran 35. Nilai kritis L untuk Uji Lilliefors.....	129
Lampiran 36. Tabel kurva normalitas persentase.....	130
Lampiran 37. Nilai persentil untuk distribusi t	131
Lampiran 38. Nilai persentil untuk distribusi F	132

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pendidikan adalah suatu bentuk kebutuhan wajib yang harus ditempuh dan dilalui oleh manusia pada abad modern ini. Melalui pendidikan dapat diketahui berbagai ilmu dan pengetahuan penting yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa: “Pendidikan adalah usaha sadar dan rencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”¹

Begitupun dengan siswa, siswa merupakan sumber daya manusia yang harus dikembangkan. Siswa merupakan faktor terpenting dalam pembangunan masyarakat Indonesia. Dalam hal ini peran pendidikan sangat dibutuhkan, karena pendidikan merupakan alat yang digunakan untuk melaksanakan pengembangan dan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berguna bagi bangsa dan negaranya.

Sekolah merupakan tempat atau sarana bagi siswa dalam menerapkan pendidikan. sekolah diharapkan mampu mengembangkan potensi diri siswa agar

¹ Wina sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses pendidikan*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2006), hal. 2.

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, nilai-nilai budaya yang luhur, pribadi yang kuat, serta akhlak mulia. Dengan terciptanya hal tersebut siswa akan dapat menempatkan diri dalam masyarakat. Hal ini diharapkan, agar siswa mampu menerima pelajaran yang telah diberikan guru dengan baik dengan menerapkan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari dan memiliki prestasi belajar yang baik.

Dewasa ini ilmu politik dan demokrasi sama-sama berhubungan serta terkait di dalamnya. Karena makna demokrasi bukan hanya sebagai bentuk pemerintahan tetapi juga sebagai konsep sistem politik, yang dibarengi oleh jalannya sistem demokrasi. Jadi jika membahas konsep demokrasi sudah pasti akan membahas konsep politik didalamnya.

Demokrasi merupakan suatu wujud pemerintahan Indonesia. Yaitu bentuk pemerintahan yang menjunjung tinggi keputusan rakyat. Di dalam demokrasi rakyat juga mempunyai andil di dalamnya yang menyangkut kegiatan dalam politik. Jika demokrasi dilakukan dan dilaksanakan secara terus menerus nantinya, hal ini akan menjadi suatu kebiasaan dan berkembang menjadi suatu budaya, yang dinamakan dengan budaya demokrasi. Budaya demokrasi perlu dikembangkan dan diterapkan bagi diri siswa. Penerapannya dapat dilakukan secara individu maupun berkelompok. Tujuannya agar dalam diri siswa kelak, tumbuh dan tercermin nilai-nilai luhur bangsa yang akan mengiringi sebagai pribadi yang kuat dan sukses dimasa akan datang.

Dalam proses pembelajaran, siswa banyak diajarkan berbagai bidang ilmu serta perilaku yang harus ditiru dan diterapkan dalam diri. Masing-masing guru mata pelajaran mempunyai tugas dan pengajaran tersendiri untuk pencapaian proses dan hasil belajar yang baik. Tak beda jauh dengan pelajaran kewarganegaraan yang diberikan oleh pihak sekolah sebagai mata pelajaran yang wajib ditempuh oleh siswa. Pelajaran kewarganegaraan dewasa ini banyak membahas tentang aspek kenegaraan serta hal-hal terkait yang menyangkut di dalam negara. Salah satu contohnya adalah kajian mengenai materi politik dan demokrasi bagi warga negara Indonesia.

Dalam pembelajaran Kewarganegaraan terdapat materi mengenai politik dan demokrasi, khususnya bagi siswa kelas XI. Politik dan demokrasi menjadi bahasan atau materi yang saling terkait dan berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Materi-materi tersebut telah menjadi pola kehidupan bahkan gejala sosial yang diterapkan dalam kegiatan kehidupan sehari-hari baik di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Karena pada dasarnya kegiatan politik sudah banyak terlibat di dalam warga sekolah, baik itu hubungan guru dengan siswa maupun dengan sesama siswa.

Diharapkan dalam diberikannya materi tentang politik untuk siswa, dapat membentuk sikap dan perilaku manusia yang baik, yang disisipkan melalui nilai-nilai demokrasi dan kemudian akan berwujud menjadi sikap dan perilaku demokrasi dalam kehidupan sehari-hari disekolah. Hal ini dilihat dari sejauh

mana siswa berperan dan terlibat aktif atau berpartisipasi langsung dalam hal pengambilan keputusan, sejauh mana peran siswa dalam hal mempengaruhi kelompok lain demi terciptanya suatu tujuan, sejauhmana peran siswa dalam mempertahankan kebijakan, hal berpendapat, tata tertib di sekolah, menghargai keberagaman serta toleransi, dan lain-lain. Semua itu biasa terlibat dalam kegiatan siswa di sekolah. Contohnya antara lain dalam kegiatan organisasi siswa , baik organisasi intra maupun ekstra, kegiatan proses pembelajaran, diskusi siswa baik di dalam kelas maupun di luar kelas, dan lain-lain. Peran lembaga osis serta keterlibatan anggota di dalam osis tersebut yang banyak berperan dalam penyampaian aspirasi siswa di sekolah. Banyak aktivitas-aktivitas tersebut yang dilakukan siswa di sekolah yang mencerminkan perilaku budaya demokrasi yang memungkinkan siswa telah mengetahui dan sadar, akan pemahaman siswa tentang politik.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di SMA NEGERI 5 DEPOK. Pada objek penelitian ditemukan permasalahan yang dapat diambil sebagai bahan penelitian. Yaitu bagi siswa kelas XI setelah siswa mempelajari materi politik, ternyata dari hasil pengamatan dari beberapa siswa, ditemukan budaya demokrasi belum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah dengan baik. Contohnya adalah kurangnya rasa toleransi diri antar siswa, siswa yang melanggar atau tidak melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban, kurangnya peran partisipasi siswa dalam berorganisasi, siswa yang berselisih dalam hal

berpendapat baik dalam kegiatan diskusi kelas maupun luar kelas, pembatasan berpendapat oleh guru, siswa yang tidak mengikuti pemilihan ketua osis dan sebagainya.

Sekolah yang menjadi kajian dalam penelitian ini ialah SMA NEGERI 5 DEPOK. SMAN 5 terletak di Jl. Raya Bukit Rivaria Sawangan Depok. Merupakan sekolah menengah atas favorit bagi siswa yang berdomisili di wilayah Depok. SMAN 5 mengharapkan siswa-siswi keluarannya menjadi manusia yang berprestasi, berbudaya, berakhlak mulia, serta berwawasan lingkungan. Sehubungan dengan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti hal hubungan pemahaman materi politik dengan budaya demokrasi siswa di SMA NEGERI 5 DEPOK.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Sejauh mana pemahaman siswa mengenai materi politik dengan budaya demokrasi siswa ?
2. Apakah peran lembaga Organisasi siswa berpengaruh pada budaya demokrasi siswa ?
3. Apakah terdapat hubungan antara pemahaman tentang materi politik dengan budaya demokrasi siswa ?

C. PEMBATAAN MASALAH

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, ternyata masalah politik dan demokrasi mencakup masalah yang luas. Karena keterbatasan waktu dalam penelitian dalam upaya pemecahan masalah tersebut, maka peneliti membatasi masalah pada hubungan tingkat pemahaman tentang materi politik dengan budaya demokrasi siswa. Budaya demokrasi dibatasi pada perilaku demokrasi.

D. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah di atas maka dapat ditarik perumusan masalah sebagai berikut : ” Apakah terdapat hubungan antara pemahaman tentang materi politik dengan budaya demokrasi siswa ?”

E. KEGUNAAN PENELITIAN

Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Untuk penambah wawasan dan pengetahuan para pembaca serta sebagai bahan referensi informasi dalam melakukan penelitian dengan judul yang terkait.
2. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pihak sekolah dalam mengukuhkan budaya demokrasi antar siswa.

BAB II

PENYUSUNAN KERANGKA TEORI, KERANGKA BERPIKIR, DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

A. Deskripsi Teoretis

1. Pemahaman Materi Politik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pemahaman adalah proses, perbuatan memahami atau memahamkan.² Menurut Bloom dalam Dimiyati dan Mudjiono, pemahaman merupakan salah satu yang termaksud dalam ranah kognitif. Bloom mengatakan bahwa pemahaman mencakup kemampuan menangkap arti dan makna tentang hal yang dipelajari.³

Dalam pemahaman menurut Arikunto, siswa diminta untuk membuktikan bahwa siswa memahami hubungan yang sederhana di antara fakta-fakta atau konsep.⁴ Sedangkan kata-kata operasional kognitif dari pemahaman ialah mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, menggenerealisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, memperkirakan.⁵

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 998.

³ Dimiyati dan Mudjiono, *Belajar dan Pembelajaran*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2006), hal. 27.

⁴ Suharsimi Arikunto, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), hal. 118.

⁵ *Ibid*, hal. 137.

Berdasarkan teori di atas dapat beranggapan bahwa pemahaman merupakan salah satu tingkat dalam ranah kognitif dengan tujuan untuk

seorang siswa dapat menangkap arti, memahami atau mengerti tentang isi pelajaran yang dipelajari. Mengenai pemahaman, Bloom mengemukakan taksonomi pemahaman berada pada ranah kognitif, yang terdiri atas :

- Mengenal, dalam mengenal siswa diminta untuk memilih satu dari dua atau lebih jawaban.
- Pemahaman, siswa diminta untuk membuktikan bahwa ia memahami hubungan yang sederhana di antara fakta-fakta atau konsep.
- Penerapan, siswa dituntut memiliki kemampuan untuk menyeleksi atau memilih suatu abstraksi tertentu secara tepat untuk diterapkan dalam suatu situasi baru dan menerapkan secara benar.
- Analisis, siswa diminta menganalisis suatu hubungan atau situasi kompleks atas konsep-konsep dasar.
- Sintesis, melakukan sintesis maka pertanyaan-pertanyaan disusun sedemikian rupa sehingga meminta siswa untuk menyusun kembali hal-hal yang spesifik agar mengembangkan struktur baru.
- Evaluasi, penyusunan soal sejauh mana siswa mampu menerapkan pengetahuan dan kemampuan yang telah dimiliki untuk menilai suatu kasus yang diajukan oleh penyusun soal.⁶

Dari teori Bloom di atas dapat disimpulkan, bahwa pemahaman merupakan tingkat kedua setelah pengetahuan dari ranah kognitif sebagai proses dari tujuan siswa dalam belajar. Berkaitan dengan hal tersebut, siswa merupakan seseorang yang sedang belajar dalam bangku sekolah, dalam belajar juga pasti dibutuhkan kemampuan untuk memahami pelajaran sebagai ranah kognitif. Dengan demikian bahwa pemahaman berarti seseorang tahu

⁶ *Ibid*, hal. 117-120.

apa yang harus dilakukan terhadap apa yang diketahui yakni di antaranya dapat untuk menjelaskan, membedakan, memberi contoh, dan menyimpulkan.

Pengertian ilmu politik sangat luas jangkauannya. Para ahli ilmu politik lebih merincikan dan menggabungkan kembali mengenai teori dalam pendekatan tingkah laku (*approach*), mengenai sikap dan perilaku manusia yang bisa dilihat dari pemahamannya mengenai politik. Hal ini tertuang dalam pendapat Robert Dahl dkk dalam Miriam Budiardjo, yang menyatakan bahwa:

Ilmu politik menggunakan cara-cara baru untuk meneliti gejala-gejala dan peristiwa-peristiwa politik secara lebih sistematis, bersandarkan pengalaman empiris dan dengan menggunakan kerangka teoritis yang terperinci dan ketat. Pendekatan ini terkenal dengan nama “pendekatan tingkah laku” (*behavioral approach*).⁷ Pendekatan tingkah laku mempunyai pengaruh yang besar atas ilmu politik dan menduduki tempat terhormat di dalamnya.⁸

Terdapat konsep-konsep pokok yang menampilkan suatu tujuan dari para kaum *behavioralis*. Konsep-konsep tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tingkah laku politik memperlihatkan keteraturan yang dapat dirumuskan dalam generalisasi-generalisasi.
2. Generalisasi-generalisasi ini pada azasnya harus dapat dibuktikan kebenarannya dengan menunjuk pada tingkah laku yang relevan.

⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hal.

4-5.

⁸ *Ibid* , hal. 7.

3. Untuk mengumpulkan dan menafsirkan data diperlukan teknik-teknik penelitian.
4. Untuk mencapai kecermatan dalam penelitian diperlukan pengukuran dan kuantitatif.
5. Penelitian politik mempunyai sikap terbuka terhadap konsep-konsep, teori-teori dan ilmu sosial lainnya.⁹

Menurut Almond dalam Komarudin Sahid, proses politik membentuk nilai-nilai yang menunjukkan bagaimana seharusnya masing-masing anggota masyarakat berpartisipasi dalam politik. Hal ini menunjuk pada proses pembentukan sikap dan pola tingkah laku sosial.¹⁰

Jadi definisi dari teori di atas, bahwa ilmu politik dapat diukur dengan melihat pola-pola tingkah laku atau perilaku manusia dan nilai-nilai yang ada dimasyarakat. Yaitu dengan cara memasukkan nilai-nilai tersebut ke dalam data kuantitatif. Sehingga dapat diasumsikan, ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan dan nantinya akan berlanjut ketingkat pemahaman yang akan dihubungkan oleh perilaku.

Anggapan bahwa perilaku menunjukkan tingkah laku terdapat di dalam Kamus Bahasa Indonesia yaitu Perilaku adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan individu untuk mengatasi sesuatu.

Pendapat lain tertuang pada sudjiono sastroatmodjo, yaitu bahwa dalam politik, perilaku dapat dinyatakan sebagai keseluruhan tingkah laku sosial masyarakat atau warga Negara yang telah saling memiliki hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam suatu sistem politik.¹¹

⁹ *Ibid.* hal. 5

¹⁰ Komarudin Sahid, *Memahami Sosiologi Politik*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), hal. 198.

¹¹ Sudijono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik*, (Semarang : IKIP Semarang Press, 1995). Hal. 1.

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Mohtar Mas'Oed dan Colin MacAndrews. Tingkah laku menunjukkan perilaku yang berupa tindakan untuk saling mendukung. Tingkah laku itu mungkin berujud tindakan-tindakan yang mendorong pencapaian tujuan, kepentingan, dan tindakan orang lain. Mungkin berujud memberikan suara yang mendukung pencalonan seorang pemimpin dalam pemilihan umum, atau membela atau mempertahankan suatu keputusan yang dibuat oleh badan yang berwenang. Dalam kasus-kasus ini tingkah laku tersebut menyatakan diri dalam bentuk tindakan nyata dan terbuka.¹²

Pada dasarnya politik adalah suatu usaha atau kegiatan yang berhubungan tentang kehidupan bermasyarakat dan negara. Dalam konteksnya, politik menyangkut hal sebagai gejala sosial yang berhubungan dengan aspek pemerintahan dan rakyat, yang semuanya berkaitan antara satu sama lain. Jadi apabila berbicara politik, berarti berbicara menyangkut urusan negara baik itu bentuk pemerintahannya maupun sistem pemerintahan yang dijalaninya.

Pemikiran tentang definisi politik banyak berkembang dari abad ke abad. Pemikiran tentang definisi politik terus bergulir hingga masa sekarang. Plato dan Aristoteles, politik adalah suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik (*polity*) yang terbaik.¹³ Sedangkan menurut Peter Merkl, menggambarkan politik sebagai usaha mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan keadilan.¹⁴

¹² Colin MacAndrews dan Mochtar Mas'oed, *Perbandingan Sistem Politik*, (Yogyakarta : Universitas Gajah Mada, 1995), hal. 11-12.

¹³ Miriam Budiardjo, *Demokrasi di Indonesia Demokrasi parlementer dan Demokrasi Pancasila*,

(Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), hal. 55.

¹⁴ *Ibid.*

Rush dan Althoff, politik bisa diartikan sebagai proses penyelesaian dari konflik-konflik manusia; atau proses dengan mana masyarakat membuat keputusan-keputusan ataupun mengembangkan kebijakan-kebijakan tertentu; atau secara otoritatif (dalam kekuasaan yang sah) mengalokasikan sumber-sumber dan nilai-nilai tertentu; atau berupa pelaksanaan kekuasaan dan pengaruh di dalam masyarakat.¹⁵

Menurut Colin MacAndrews, ruang lingkup politik berkaitan dengan masalah cara pembuatan keputusan-keputusan yang otoritatif dalam suatu masyarakat, maka tuntutan-tuntutan itu memerlukan perhatian khusus sebagai input utama bagi sistem politik.¹⁶ Charles Hyneman berpendapat, lingkup politik sekarang semakin luas meliputi “ struktur organisasional, proses pembuatan, keputusan dan tindakan, politik penguasaan, kebijaksanaan dan tindakan serta lingkungan manusia dari suatu pemerintahan yang legal.¹⁷

Miriam Budiardjo mengatakan bahwa, politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.¹⁸

Pada dasarnya politik yang berupa sistem terbentuk dalam suatu masyarakat. Masyarakat inilah yang terjun atau melibatkan diri dalam kegiatan politik atau partisipasi politik, yang disebabkan karena adanya suatu tuntutan-tuntutan dari orang-orang atau kelompok dalam masyarakat yang tidak semuanya dapat terpenuhi dan memuaskan di dalam kebijakan

¹⁵ Komarudin sahid, *Memahami Sosiologi Politik*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), hal. 5.

¹⁶ Colin MacAndrews dan Mochtar Mas' oed, *Perbandingan Sistem Politik*, (Yogyakarta : Universitas Gajah Mada, 1995), hal. 10.

¹⁷ SP. Varma, *Teori Politik Modern*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2007), hal. 9.

¹⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hal. 8.

pemimpin. Dari peran serta masyarakat yang aktif dalam kegiatan partisipasi politik, hal ini membawa pengaruh dan dampak kebiasaan yang positif dalam masyarakat. Semua ini akan membentuk suatu kebiasaan yang membudaya dalam keseharian yang berupa Sikap dan perilaku. Sikap dan perilaku inilah yang membentuk budaya politik bagi masyarakat.

Almond dan Verba mendefinisikan budaya politik sebagai suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara di dalam sistem itu.¹⁹ Berdasarkan definisi ini, maka tipe-tipe budaya politik suatu masyarakat dapat terlihat. Dengan kata lain pengertian budaya politik dapat digunakan untuk mengukur dan menilai budaya politik suatu masyarakat atau bangsa menurut tipe-tipe budaya politik tertentu. Adapun tipe-tipe budaya politik bagi bangsa Indonesia yaitu : Budaya Politik Parokial, Budaya Politik Subyek/Kawula, Budaya Politik Partisipan.²⁰ Dalam Penelitian ini peneliti mencantumkan konsep budaya politik partisipan, yang dilihat dalam konsep budaya demokrasi.

Menurut Almond dan Verba dikutip Komarudin Sahid, tipe budaya politik partisipan adalah suatu bentuk budaya yang anggota-anggota masyarakatnya cenderung memiliki orientasi yang nyata terhadap

19 Nazarudin Sjamsudin, *Profil Budaya Politik Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1991), hal. 21.

20 Komarudin Sahid, *Memahami Sosiologi Politik*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), hal. 155.

sistem secara keseluruhan, struktur dan proses politik administrative objek-objek *input* dan *output*. Contoh masyarakat atau bangsa yang memiliki tipe budaya politik partisipan menurut studi Almond dan Verba adalah Inggris dan Amerika Serikat.²¹

Budaya politik dalam suatu bangsa dapat dilihat dan diukur melalui tipe-tipe budaya politik yang ada di suatu bangsa tersebut. tipe-tipe tersebut tentunya berdasarkan penilaian survei suatu penelitian. Dan tipe-tipe budaya politik bagi bangsa Indonesia adalah parokial, subyek / kawula, dan partisipan.

Jadi menurut pendapat para ahli di atas, definisi dari politik adalah usaha serta cara dalam suatu kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan, baik itu dalam pembentukan dan pembagian kekuasaan. Dalam arti lain dapat disimpulkan, politik ialah kegiatan interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang sifatnya mengikat untuk kepentingan bersama di dalam suatu negara. Dengan demikian di dalam politik manusia akan hidup secara bahagia dan berkeadilan tinggi dalam tatanan moralitas nilai yang tinggi di dalam masyarakat. Perbedaan-perbedaan dalam definisi politik melahirkan beberapa konsep pokok mengenai unsur politik, konsep-konsep itu merupakan hasil kesamaan dari definisi politik.

²¹ *Ibid*, hal. 157.

Menurut Miriam Budiardjo, konsep-konsep pokok politik itu adalah Negara (*state*), kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decision making*), kebijakan (*policys beleid*), dan pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*).²²

Juga menurut The Liang Gie, konsep-konsep politik dibedakan menjadi :

1. Negara
2. Pemerintahan
3. Kekuasaan
4. Fakta politik
5. Organisasi masyarakat
6. Kegiatan politik.²³

Jadi konsep politik mempelajari hal yang menyangkut tentang negara atau pemerintahan, kekuasaan, organisasi masyarakat, serta kegiatan-kegiatan. Mengenai organisasi politik, organisasi merupakan sistem kerjasama sekelompok manusia dalam kegiatan tertentu. Jadi dalam organisasi tentu terdapat kegiatan-kegiatan manusia di dalamnya.

Yang dimaksud dengan kegiatan politik ialah segenap usaha orang untuk memerintah dirinya sendiri, menciptakan pemerintah-pemerintah dan negara-negara dan untuk mengendalikan nasibnya

²² Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hal. 9.

²³ The Liang Gie, *Ilmu Politik*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1982), hal. 16.

dalam hidup bermasyarakat. Yang memakai istilah “*political behavior*”.²⁴

Maka dari itu, dimulai dari kegiatan-kegiatan politik inilah timbul tingkah laku yang berupa perilaku politik dalam diri seseorang. Perilaku-perilaku inilah yang dinilai sebagai tujuan dari kesadaran akan politik, yang berguna demi kesejahteraan orang banyak.

Untuk melaksanakan semua itu, pemerintah maupun masyarakat dituntut untuk memiliki kesadaran politik. Kesadaran politik juga harus dicerminkan kepada diri siswa. Untuk menumbuhkan kesadaran akan politik sebagai warga negara, maka harus memiliki partisipasi politik dan pendidikan politik yang tinggi, sebagaimana keduanya mempunyai peran dan fungsi yang amat penting.

Gaventa dan Valderama menyatakan bahwa, partisipasi politik melibatkan intreraksi perseorangan atau organisasi, biasanya partai politik, dengan negara. Karena itu, partisipasi politik sering kali dihubungkan dengan demokrasi politik, perwakilan, dan partisipasi tak langsung.²⁵

Menurut Alfian, makna pendidikan politik sebagai usaha sadar untuk mengubah sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami

²⁴ *Ibid*, hal. 23-24.

²⁵ Komarudin Sahid, *op. cit*, hal. 176-177.

dan menghayati betul-betul nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun.²⁶

Peran partisipasi politik dan pendidikan politik berfungsi untuk memberikan isi dan arahan sebagai makna suatu nilai-nilai yang sedang berlangsung bagi suatu negara. Nilai-nilai yang terkandung ini tentunya harus sesuai dengan norma-norma dasar negara Indonesia yaitu, Ideologi nasional atau Pancasila. Karena sebagai peningkatan kesadaran rakyat atau warga negara, mengenai hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang dapat dilaksanakan dalam kehidupan nyata sehari-hari secara bertanggung jawab penuh. Selain itu untuk para siswa, partisipasi politik dan pendidikan politik berguna untuk pemahaman dan minat politik siswa sebagai warga negara Indonesia.

Dilain hal, pendidikan politik bertujuan menjadikan semua warga negara tunduk dan patuh terhadap hukum yang dilandasi dengan penuh kesadaran. Memiliki sikap kedisiplinan yang tinggi, aktif dan kreatif sebagai warga negara, serta menjunjung tinggi kehidupan yang demokratis secara sadar.

Begitupun halnya pendidikan politik untuk siswa. Tujuan dari pendidikan politik bagi siswa adalah agar siswa mengetahui dan paham akan

²⁶ Sri Wuryan, *Ilmu Kewarganegaraan (CIVICS)*, (Bandung : Laboratorium Pendidikan KWN Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, UPI , 2008) hal. 71.

hak dan kewajibannya sebagai warganegara tentunya dilandasi dengan penuh tanggung jawab.

Politik mempunyai arti sebagai suatu proses atau rangkaian kegiatan-kegiatan yang saling berkaitan dalam lingkup politik yang mempengaruhi segi input (sistem) dan output (proses politik) yang dinamakan dengan sistem politik. sistem politik diikuti serta oleh segenap warga negara atau masyarakat di dalam lingkup politik dengan tujuan mempunyai suatu kepentingan secara bersama-sama. Contohnya dalam segi input yaitu berupa tuntutan dan dukungan contohnya dalam segi ekonomi, status masyarakat, kekuasaan dan pendidikan. Sedangkan dari segi output yaitu berupa kebijakan atau keputusan yang diambil oleh pemimpin, dalam melaksanakan dan penegakkan tuntutan dan dukungan tersebut.

Dalam garis besar, politik mempunyai peran dalam kegiatan-kegiatan antar individu satu atau kelompok satu untuk mempengaruhi individu lain atau kelompok lain guna mencapai suatu kepentingan tujuan secara bersama-sama.

Hal ini juga berpengaruh pada lingkungan siswa di sekolah. Dengan adanya peran lembaga Organisasi siswa di sekolah, yaitu sebagai wadah bagi para siswa dalam memulai pendidikan politik mereka. Siswa diajarkan dan untuk terjun langsung serta berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan politik di sekolah.

Untuk terlaksananya politik dengan baik maka di sekolah dibuat kurikulum tentang materi politik untuk siswa, yang terdiri dari kajian-kajian politik yang berupa

budaya politik, tipe-tipe budaya politik, sosialisasi pengembangan politik, serta peran serta budaya politik partisipan. Untuk mewujudkan semua itu harus dibarengi dengan dukungan yang berupa aspek pemahaman yang bermula dari pengetahuan serta diiringi perilaku. Pemahaman akan ilmu politik amatlah penting bagi kelangsungan hidup manusia dalam bermasyarakat juga bagi kelangsungan siswa di sekolah. Karena pemahaman politik berhubungan dengan perilaku manusia. Dalam penelitian ini peneliti menghubungkan mengenai budaya demokrasi yang dibatasi pada perilaku. Dimana demokrasi merupakan suatu bentuk sistem politik yang berperan dalam tindakan dan tingkah laku individu dalam partisipasi politik, yang berkembang dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Budaya merupakan hasil dari perilaku manusia, yang masuk dalam budaya demokrasi.

Untuk indikator pemahaman materi politik, peneliti mengambil teori Bloom dikutip Suharsimi Arikunto, berdasarkan kata operasional kognitif dari pemahaman yaitu menjelaskan, membedakan, memberikan contoh, dan menyimpulkan.

2. Budaya Demokrasi

Pada saat ini banyak negara yang mengaku bahwa sistem pemerintahannya adalah demokrasi. Hal ini menunjuk bahwa rakyat berada dalam posisi atau peran penting dalam suatu negara. Tak beda dengan negara Indonesia yang bentuk pemerintahannya adalah demokrasi. Negara demokrasi memerlukan budaya

demokrasi untuk dapat mewujudkan negara demokrasi tersebut. Yang mana baik pemerintahan dan warga negaranya harus memiliki sikap dan perilaku demokrasi.

Dalam upaya menerapkan budaya demokrasi, peran sekolah merupakan tempat yang sangat penting bagi siswa untuk belajar berdemokrasi. Yang mana semua warga sekolah dan semua unsur yang ada di sekolah bertanggung jawab dan mendukung langgengnya demokrasi di Indonesia. Untuk lebih memahami budaya demokrasi, terlebih dahulu kita mengenal tentang budaya dan demokrasi itu sendiri.

Budaya berasal dari bahasa Sansekerta, *buddhayah*, sebagai bentuk jamak dari *budhi*, yang artinya budi atau akal. Dalam bahasa inggris budaya sama dengan *culture*. *Culture* berasal dari bahasa latin, *colere*, yang artinya segala daya dan upaya manusia untuk mengubah alam.²⁷

Ilmu Antropologi, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. ²⁸

Koentjaraningrat mengemukakan, budaya adalah segala sesuatu yang dibuat manusia yang berupa hasil cipta dan karya manusia yang mengalami perubahan dan menerima peninggalan budaya dari generasi sebelumnya.²⁹

Kemudian menurut pendapat ahli lain Edward Burnett Tylor, secara luas mengartikan budaya sebagai : “*Culture or civilization, taken in its*

²⁷Pengertian Budaya, <http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya>. (Diakses tanggal 10 Maret 2012).

²⁸ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta : Aksara Baru, 1986), hal. 180.

²⁹ *Ibid.*

wide ethnographic sense, is that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society". Atau budaya mempunyai pengertian teknografis yang luas meliputi ilmu pengetahuan, keyakinan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan berbagai kemampuan dan kebiasaan lainnya yang didapat sebagai anggota masyarakat. 30

Menurut Michel Thompson pengertian budaya ialah, sebagai cara hidup dirumuskan sebagai interaksi yang saling meneguhkan antara *cultural bias* (nilai dan norma yang dipahami bersama) dan *social practice* (hubungan sosial).³¹

Dari beberapa pengertian para ahli di atas, bahwa budaya merupakan kumpulan dari keyakinan, nilai-nilai, kepercayaan dan kebiasaan sehingga membentuk norma perilaku bagi individu yang berada dalam kumpulan masyarakat atau organisasi. Kebudayaan dapat tampak dalam bentuk perilaku masyarakat yang berupa hasil dari gagasan, ide-ide, serta pemikiran yang diimplikasikan dalam sikap dan perilaku seseorang sehari-hari. Serta budaya ialah segala aktivitas atau seluruh tindakan manusia dan karya manusia.

30 Edward Burnett Tylor dikutip Muhammad, *Budaya Organisasi*.

<http://zanikhan.multiply.com/journal/item/1065>. (Diakses tanggal 10 Maret 2012).

31 Miriam Budiardjo, *Teori-teori Politik Dewasa Ini*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 33.

Di dalam budaya terdapat unsur-unsur kebudayaan, sebagai suatu sistem dari ide-ide dan konsep-konsep dari wujud kebudayaan sebagai suatu rangkaian tindakan dan aktivitas manusia .

Menurut koentjraningrat, terdapat unsur-unsur yang secara universal, ada dan bisa didapatkan di dalam semua kebudayaan. Ke tujuh unsur pokok itu adalah:

1. Bahasa
2. Sistem pengetahuan
3. Organisasi sosial
4. Sistem peralatan hidup dan teknologi
5. Sistem pencaharian hidup
6. Sistem religi
7. Kesenian. 32

Semua unsur kebudayaan diatas, dapat dipandang dari ketiga wujud kebudayaan. Melihat kebudayaan dilihat dari unsur-unsur yang mana. Tiga wujud kebudayaan antara lain :

1. Sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, dan peraturan. Yang dikatakan sebagai sistem budaya.
2. Sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Yang dikatakan sebagai sistem sosial.
3. Sebagai benda-benda hasil karya manusia. Yang disebut dengan kebudayaan fisik.33

32 Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta : Aksara Baru, 1986), hal. 203-204.

33 *Ibid*, hal. 186-187.

Kebudayaan dimiliki oleh setiap masyarakat dan akan selalu berkembang dalam upaya memenuhi segala kebutuhan masyarakat. Dalam budaya demokrasi ditandai dengan adanya musyawarah dalam memutuskan hasil dan saling berbagi nilai dan keyakinan yang sama dengan seluruh anggota di dalamnya. Misalnya berbagi nilai dan keyakinan yang sama melalui proses tujuan atau kegiatan. Contoh perilaku budaya demokrasi siswa tercermin dalam anggota organisasi OSIS, yang mengedepankan musyawarah dalam kegiatan pengurusan OSIS. Para anggota OSIS harus membawa rasa bangga dan membentuk citra organisasi yang kuat.

Setelah mengetahui konsep dasar dari budaya, sekarang penulis akan membahas mengenai arti demokrasi.

Abraham Lincoln berpendapat, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (*government of the people, by the people, and for the people*)³⁴

Menurut C. F. Strong, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintahan akhirnya mempertanggung jawabkan tindakan-tindakan kepada mayoritas itu.³⁵

34 Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2009), hal. 92.

35 *Ibid.*

Pengertian demokrasi dari beberapa ahli di atas ialah, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang di mana rakyat juga mempunyai kekuasaan, atau dapat di katakana pula rakyat juga mempunyai kedaulatan penuh dalam hal kebijakan-kebijakan pemerintah. rakyat mempunyai kebebasan dalam berpendapat dan mengeluarkan suaranya dalam kegiatan pemerintah untuk mencapai suatu tujuan.

Pemerintah telah mendapat mandat atau perintah dari rakyat untuk memimpin penyelenggaraan bernegara, dan pemerintah menjalankan kebijakan-kebijakannya itu berlandaskan kepentingan dan kesejahteraan rakyat, dengan penuh tanggung jawab dalam pelaksanaannya.

Arti demokrasi berbeda, teretus oleh pendapat para ahli lain di bidang politik, para ahli politik membangun sebuah teori baru tentang demokrasi yang dapat diselaraskan kembali dengan teori elit politik. Mereka membangun suatu pendapat tentang demokrasi sebagai suatu sistem politik, diantaranya yaitu :

International Commission for Jurist. Demokrasi sebagai sistem politik, yaitu sistem politik yang demokratis adalah suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas.³⁶

³⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka, 2007), hal. 61.

Selanjutnya Henry B. Mayo berpendapat. Sistem politik yang demokratis ialah di mana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.³⁷

Sartori, demokrasi adalah suatu sistem politik di mana pengaruh kelompok mayoritas dijamin oleh kelompok minoritas yang dipilih dan berkompetisi dan yang kepadanya sistem itu dipercayakan. ³⁸

Jadi demokrasi juga diartikan sebagai sistem politik, yang berperan untuk melindungi kebebasan warga negara sekaligus memberi mandat bagi pemerintah untuk menjamin kebebasan tersebut, dan bagaimana sebenarnya tindakan serta perilaku masyarakat. Pada dasarnya demokrasi itu merupakan kelembagaan dan kebebasan. Dan inilah yang disebut dengan sistem politik demokrasi, yang memegang teguh hak kebijaksanaan umum mayoritas.

Hal ini tertuang pada pendapat Maswadi Rauf, bahwa prinsip utama demokrasi ada dua :

1. Kebebasan/persamaan (*freedom/equality*)
2. Kedaulatan rakyat (*people's sovereignty*)³⁹

³⁷ *Ibid.*

³⁸ SP. Varma, *Teori Politik Modern*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 215.

³⁹ Winarno, *op.cit*, hal 93.

Robert Dahl juga berpendapat, demokrasi juga melibatkan dua dimensi, yaitu perlombaan (*contestation*) dan peran serta (*participation*). Prosedur demokrasi seperti ini mengasumsikan adanya kebebasan-kebebasan berbicara, menyebarluaskan pendapat, berkumpul, dan berserikat sehingga perdebatan politik dan kampanye pemilihan umum dapat diselenggarakan.⁴⁰

Gaffar mengatakan, makna demokrasi berkaitan erat dengan hak dasar sebagai manusia, seperti kebebasan berekspresi, kebebasan dalam keyakinan, dan kebebasan berperilaku. Nilai-nilai demokrasi harus dilaksanakan atau dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari seperti tanggung jawab, disiplin diri, berpikir objektif dan rasional, kasih sayang dan peduli, respek terhadap sesama, dan menerima perbedaan pendapat diantara sesama warga masyarakat.⁴¹

Demokrasi mengandung makna, sebagai bentuk dari pemerintahan yang memegang teguh hak rakyat dalam kebebasan. Tetapi konteks kebebasan disini harus tertuang dalam nilai-nilai bangsa yang luhur, dilandasi dari ideologi bangsa pancasila. Nilai-nilai ini didasari oleh keinginan dan kebutuhan yang sama antara individu satu dan lainnya. Dapat ditegaskan bahwa demokrasi menekan adanya prinsip-prinsip persamaan dan kebebasan yang dilandasi oleh norma atau aturan yang berlaku. Yang nantinya dalam nilai-nilai demokrasi akan terwujud dan timbul suatu kebiasaan sikap dan pola perilaku yang disebut dengan budaya demokrasi.

Menurut John dewey, demokrasi adalah pandangan hidup yang dicerminkan dari perlunya partisipasi dari warga Negara dalam membentuk nilai-nilai yang

40 Miriam Budiarmo, *Teori-teori Politik Dewasa Ini*, (Jakarta : raja Grafindo, 1996), hal. 10.

41 Sri Wuryan dan Syaifullah, *Ilmu Kewarganegaraan (CIVICS)*, (Bandung : Laboratorium Pendidikan KWN UPI Bandung, 2008), hal. 85.

mengatur kehidupan bersama.⁴² Sedangkan menurut Tim ICCE UIN Jakarta (2003), demokrasi sebagai *way of life* (pandangan hidup) dalam seluk-beluk sendi kehidupan bernegara, baik oleh rakyat (masyarakat) maupun pemerintah.⁴³ Menurut Bingham Powel , Jr, budaya demokrasi adalah bagaimana nilai-nilai ideal demokrasi dijalankan.⁴⁴

Jadi menurut pendapat para ahli di atas ialah, bahwa kultur atau budaya demokrasi berlaku pada nilai-nilai demokrasi dimasyarakat. Dan nilai-nilai tersebut diperaktekkan dalam perilaku sehari-hari dan menjadi kebiasaan di masyarakat. Atau dalam kata lain budaya merupakan hasil dari perilaku demokrasi yang masuk dalam budaya demokrasi. Juga budaya demokrasi merupakan pemahaman praktek pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan politik sehari-hari.

Budaya demokrasi adalah sikap dan pola perilaku masyarakat atau warga negara dalam mempraktikkan konsep pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat, untuk rakyat. Sikap dan pola perilaku yang berpandangan hidup untuk mengutamakan persamaan hak dan kewajiban sebagai warganegara yang dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti menyelesaikan persoalan melalui musyawarah, menghormati perbedaan pendapat dan memahaminya, serta mengajak segenap lapisan

⁴² winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2009), hal. 99

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Nazaruddin Sjamsudin, *Profil Budaya Politik Indonesia*, (Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti, 1991), hal. 152.

masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemerintahan, menaati peraturan yang berlaku, menghormati HAM, serta hidup secara damai.

Untuk dapat melaksanakan budaya demokrasi tersebut, masyarakat Indonesia harus dapat membudidayakan perilaku-perilaku yang mendukung tegaknya prinsip-prinsip demokrasi. Dan membentuk masyarakat yang demokratis. Karena budaya demokrasi penting untuk tegaknya demokrasi di suatu negara, dan didasari oleh beberapa nilai-nilai demokrasi di suatu Negara.

Menurut Henry B. Mayo, demokrasi harus didasari oleh beberapa nilai, yang dianut oleh masyarakat demokratis. Nilai-nilai tersebut yaitu :

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang selalu berubah
3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur
4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum
5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman
6. Menjamin tegaknya keadilan.⁴⁵

Rusli Karim menyebutkan perlunya kepribadian yang demokratis meliputi : inisiatif, toleransi, kecintaan terhadap keterbukaan, komitmen dan tanggung jawab dan kerjasama keterhubungan. ⁴⁶

⁴⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka, 2007), hal. 62.

⁴⁶ Winarno, *op,cit.*

Nilai-nilai demokrasi harus dipraktekkan dan dilaksanakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dan nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi nantinya akan berubah menjadi perilaku hidup. Nantinya dari nilai-nilai dan perilaku hidup ini, akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi suatu kebiasaan. Inilah apa yang disebut dengan budaya demokrasi.

Tetapi dalam pelaksanaan budaya demokrasi tidak hanya berlandaskan dengan nilai-nilai demokrasi. Dalam melaksanakan nilai-nilai tersebut dibutuhkan atau perlu diselenggarakan lembaga-lembaga demokrasi.

Hal ini sesuai dengan pendapat Miriam Budiardjo, bahwa untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu diselenggarakan beberapa lembaga sebagai berikut :

1. pemerintahan yang bertanggung jawab.
2. suatu dewan perwakilan rakyat yang memiliki golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat dan yang dipilih dengan pemilihan umum yang bebas dan rahasia dan atas dasar sekurang-kurangnya dua calon untuk setiap kursi. Dewan ini mengadakan pengawasan memungkinkan oposisi yang konstruktif dan memungkinkan penilaian terhadap kebijakan pemerintah secara kontinu.
3. Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik. Partai-partai menyelenggarakan hubungan yang kontinu antara masyarakat umum dan pemimpin-pemimpinnya.
4. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat
5. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan.⁴⁷

⁴⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : PT Garamedia Pustaka Utama, 2007), hal. 63-64.

Lembaga-lembaga demokrasi ini berguna untuk menampung atau sebagai wadah aspirasi rakyat, serta adanya lembaga demokrasi diharapkan dapat terlaksananya sistem politik demokrasi bagi masyarakat.

Contoh di dalam sekolah, di bentuklah lembaga-lembaga organisasi siswa yaitu OSIS dan MPK. Lembaga-lembaga ini berperan penuh dalam pembentukan atau sebagai wadah proses pembelajaran siswa dalam hal berpolitik dan berdemokrasi. Lembaga-lembaga ini mempunyai peran dan fungsi masing-masing dalam pelaksanaannya.

Alan Brown menyatakan, Masyarakat adil akan lebih dapat dicapai apabila sebanyak mungkin warga negara terlibat berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan (*participatory democracy*).⁴⁸

Jadi budaya demokrasi akan dapat terwujud dan terlaksana dengan baik, apabila masyarakat warga negaranya juga ikut berpartisipasi dalam hal demokrasi yang terkait pada pelaksanaan sistem politik.

Demikian juga dengan siswa, untuk tetap budaya demokrasi tercipta, terwujud, dan tidak pudar di Negara Indonesia. Siswa harus terus berpartisipasi aktif dalam hal pembangunan demokrasi.

Dari uraian di atas, bahwa telah diketahui demokrasi bukan hanya sebagai bentuk pemerintahan dan sistem politik, tetapi telah berkembang sebagai suatu

48 Miriam Budiardjo, *Teori-teori Politik dewasa Ini*, (Jakarta : PT Raja Grafindo persada, 1996), hal. 13.

pandangan atau budaya hidup, yaitu pandangan hidup demokratis atau biasa yang sering disebut dengan budaya demokrasi. Budaya demokrasi adalah pelaksanaan sikap dan pola perilaku masyarakat atau warga negara dalam konsep demokrasi yang dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Dalam perwujudan budaya demokrasi, budaya demokrasi harus mencakup nilai-nilai demokrasi yang sudah ada dan diterapkan secara universal dan dibutuhkan lembaga-lembaga demokrasi yang menopang terlaksananya nilai-nilai demokrasi, sehingga timbul kultur atau budaya demokrasi tersebut bagi masyarakat. kemudian dilihat dari nilai-nilai demokrasi inilah timbul suatu perwujudan perilaku demokrasi yang akan membudaya.

Begitu juga budaya demokrasi yang harus dan dipraktekkan bagi siswa di sekolah. Dalam upaya menegakkan budaya demokrasi, lingkungan sekolah merupakan tempat yang sangat penting bagi siswa untuk belajar berdemokrasi. Di sekolah, para siswa dilatih untuk giat belajar, mengemukakan pendapat, toleransi, menaati tata tertib, berpartisipasi langsung dalam kegiatan sekolah. Di sekolah mempunyai banyak media berlatih dan belajar demokrasi dan menerapkan budaya demokrasi seperti adanya organisasi siswa baik intra dan ekstra, diskusi-diskusi dan dialog siswa, adanya rapat-rapat organisasi siswa tersebut, dll. Yang semua ini harus dapat dibudayakan dengan membiasakan diri berperilaku positif dalam kehidupan sehari-hari bagi siswa disekolah maupun di lingkungan masyarakat, tentunya dalam bentuk tanggung jawab penuh.

Pemahaman akan politik amat berperan bagi siswa di sekolah. Karena pemahaman tentang materi politik berhubungan dengan perilaku siswa dalam kegiatan sehari-hari siswa di sekolah. Diharapkan dalam politik dapat membentuk nilai-nilai demokrasi yang dipraktekkan dalam perilaku siswa yang kemudian dapat diteruskan menuju budaya demokrasi.

Adapun indikator dari budaya demokrasi, dikutip oleh Gaffar dan Rusli Karim dilihat dari nilai-nilai demokrasi yang diwujudkan dalam perilaku demokrasi yaitu ; toleransi, tanggung jawab, keterbukaan, inisiatif, kerjasama.

B. Kerangka Berpikir

Setiap sekolah tentunya menginginkan keberhasilan dalam menciptakan lulusan-lulusan siswa yang bermutu yang secara tak langsung, sekolah turut meningkatkan kualitas pendidikan. Hal yang perlu diperhatikan sekolah untuk mencapai keberhasilan tersebut adalah dengan meningkatkan pendidikan dalam bidang pengetahuan. Dalam pembelajaran Kewarganegaraan, siswa diajarkan pendidikan politik dengan diadakannya materi mengenai politik. Dengan adanya pembelajaran mengenai materi politik diharapkan siswa dapat mewujudkan budaya demokrasi yang diterapkan melalui perilaku demokrasi dalam kehidupan sehari-hari sebagai generasi penerus bangsa.

Anggapan dasar dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman materi politik dengan budaya demokrasi siswa di SMAN 5 DEPOK.

Maka penelitian ini didasarkan pada anggapan bahwa pemahaman materi politik berarti seseorang tahu apa yang harus dilakukan terhadap apa yang diketahui yakni di antaranya dapat untuk menjelaskan, membedakan, memberi contoh, dan menyimpulkan nilai-nilai yang terkandung dalam politik meliputi arti dan makna politik, budaya politik, tipe-tipe budaya politik, sosialisasi pengembangan budaya politik, dan peran serta budaya politik partisipan.

Sedangkan budaya demokrasi siswa yaitu diharapkan siswa dapat menghargai toleransi, tanggung jawab, keterbukaan, kerjasama serta mampu mengemukakan pendapat secara jelas dan sistematis.

Jadi semakin tinggi pemahaman siswa tentang materi politik maka semakin tinggi pula budaya demokrasi siswa, sebaliknya semakin rendah pemahaman siswa tentang materi politik maka semakin rendah pula budaya demokrasi siswa.

C. Perumusan Hipotesis

Berdasarkan deskripsi teoretis dan kerangka berpikir di atas, maka peneliti mengajukan rumusan hipotesis sebagai berikut : bahwa “ terdapat hubungan positif antara pemahaman materi politik dengan budaya demokrasi siswa di SMAN 5 DEPOK” Artinya, semakin tinggi pemahaman siswa tentang materi politik maka semakin tinggi pula budaya demokrasi siswa.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tujuan penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan data atau fakta empiris tentang

hubungan antara pemahaman materi politik dengan budaya demokrasi siswa di SMAN 5 DEPOK.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, ialah metode korelasi dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian korelasi bertujuan untuk menemukan ada tidaknya hubungan dan apabila ada, berapa eratnya hubungan serta berarti atau tidak hubungan itu.⁴⁹

Metode ini dipilih, karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara pemahaman materi politik (variabel bebas) yang diberi simbol X dengan budaya demokrasi siswa (variabel terikat) yang diberi simbol Y.

C. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan, terhitung sejak bulan Maret sampai Mei 2012. Penelitian ini dilaksanakan di SMA NEGERI 5 DEPOK. Jl. Raya Bukit Rivaria, Sawangan Depok.

⁴⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006), hal. 270

D. Populasi dan Sampling

Populasi Target

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Populasi target dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMA N 5 DEPOK yang terdaftar pada tahun ajaran semester 2011/2012.

Populasi terjangkau

Populasi terjangkau dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI SMA N 5 DEPOK yang terdaftar pada tahun ajaran 2011/2012 yang terdiri dari 7 kelas yang berjumlah 280 siswa.

Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dalam hal ini peneliti mengambil sampel kelas XI 20% dari jumlah populasi. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Suharsimi Arikunto jika populasinya lebih dari seratus maka bisa diambil 20%-30% atau lebih.50 Maka sampel yang diambil adalah siswa dari 7 kelas.

Dari populasi terjangkau maka sampel yang diambil dalam penelitian ini ialah 40 siswa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *simple*

50 Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002), hal. 112.

random sampling yaitu penarikan sampel secara acak. *simple random sampling* adalah penarikan sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang .51

E. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

Teknik yang dilakukan untuk pengumpulan data digunakan test pilihan ganda yang akan digunakan untuk mengumpulkan data mengenai pemahaman materi politik yang merupakan variabel bebas (variabel X), sedangkan teknik pengumpulan data tentang budaya demokrasi (variabel Y) menggunakan angket tertutup, yang disebarakan kepada masing-masing responden.

Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini mengenai variabel X yaitu pemahaman materi politik menggunakan instrument atau alat ukur berupa test pilihan ganda, yang dikembangkan dalam bentuk soal materi pelajaran Pkn yang ada kaitannya dengan pemahaman materi politik. Rentangan skor yang diberikan apabila siswa menjawab pertanyaan dengan benar diberi skor 1 dan jika salah diberi skor 0. Setiap jenis respon mendapat nilai sesuai dengan arah pertanyaan yang bersangkutan pada table berikut :

Tabel 3.1

Kolom alternatif jawaban untuk variabel X

Materi Politik

Piihan	Skor
Benar	1
Salah	0

- Cara pengisiannya responden hanya menuliskan tanda silang (X) dari pilihan jawaban yang tersedia.

Sedangkan untuk memperoleh data variabel Y mengenai budaya demokrasi menggunakan instrument atau alat ukur berupa angket yang dikembangkan dalam bentuk pernyataan, yang dibuat oleh peneliti mengacu pada karakteristik perilaku berdemokrasi siswa. Angket budaya demokrasi menggunakan instrument skala perilaku (skala likert) yang dikembangkan dalam empat pilihan yaitu Sangat Sering (SS), Sering (S), Kadang-kadang (KD), dan Tidak Pernah (TP) dengan rentangan skor 4, 3, 2, 1.

Tabel 3.2

Kolom alternatif jawaban untuk variabel Y

Skala perilaku

Pilihan	SS	S	KD	TP
Positif	4	3	2	1
Negatif	1	2	3	4

Adapun kisi-kisi instrument dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 3

Kisi-kisi Instrument Pemahaman Materi Politik (variabel X)

No	Indikator	Sub indikator	Butir soal valid
----	-----------	---------------	---------------------

		(Materi Politik)				
	Pemahaman	Pengertian politik dan budaya politik	Tipe-tipe budaya politik	Sosialisasi pengembangan budaya politik	Peran serta budaya politik partisipan	
		No. item soal				
1.	Menjelaskan	1, 2, 5, 8, 9, 21, 29	7, 14, 15		3	1, 2, 3, 4, 6, 8,9, 12,13,14, 15,17, 18, 19, 21, 24, 25, 26 27, 29, 30
2.	Membedakan	11, 12, 16, 18, 20, 28, 29	10, 17	6	19	
3.	Memberikan contoh	24		26	22, 25, 27	
4.	Menyimpulkan	4			23, 13, 30	
Jumlah					30	21

Tabel 3. 4

Kisi-kisi Instrument Budaya Demokrasi Siswa (variabel Y)

o.	Indikator	Sub Indikator	No. Item	Butir
----	-----------	---------------	----------	-------

			(+)	(-)	soal Valid
1.	Toleransi	<ul style="list-style-type: none"> • Terbuka saran atau kritik • Menganggap wajar adanya keanekaragaman 	6, 14	7, 13	6, 7, 14
			1, 2, 5	3, 4	1, 2, 3, 5
2.	Tanggung jawab	<ul style="list-style-type: none"> • Menjamin tegaknya keadilan • Melaksanakan kewajiban 	22	21	21, 22
			12, 18, 19, 20, 29		12, 18, 20, 29

3.	Keterbukaan	<ul style="list-style-type: none"> • Diskusi dan musyawarah • Melihat hasil keputusan yang bertanggung jawab • Menyelenggarakan pergantian pemimpin 	8, 9, 10 16 17	11 15	9, 10, 11 15, 16 17
4.	Inisiatif	<ul style="list-style-type: none"> • Berpikir objektif dan rasional 	23, 24, 26	25	25, 26
5.	Bersahabat	<ul style="list-style-type: none"> • Respek terhadap sesama 	27, 28, ,30		27, 30
Jumlah			30		23

1. Validitas Instrumen

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkatan kevalidan atau kesahian suatu instrumen. Suatu instrumen dikatakan valid apabila instrumen itu mampu mengukur apa yang diinginkan secara tepat, artinya dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Suatu instrumen yang valid mempunyai validitas yang tinggi, sebaliknya yang kurang berarti memiliki validitas yang rendah.

Validitas kedua instrumen memperoleh dengan uji validitas. Untuk variabel X dengan menggunakan proses validitas dilakukan dengan menganalisis data hasil uji coba instrumen yaitu validitas butir yang menggunakan point biserial. Kriteria batas minimum pernyataan yang diterima adalah $r_{\text{tabel}} = 0,361$.

Rumus menghitung validitas variabel X untuk mencari angka indeks korelasi point biserial adalah sebagai berikut:

$$r_{\text{pbi}} = \frac{M_i - M_t}{SD} \sqrt{\frac{p}{q}}$$

Keterangan : r_{pbi} : koefisien point biserial

M_i : mean (rata-rata) skor yang dicapai oleh subjek yang menjawab benar

M_t : mean skor total

S_t : standar deviasi dari skor total

P : proposi jawaban yang benar dibagi jumlah responden

q : proposi jawaban yang salah dibagi jumlah responden

sedangkan untuk mencari tahu validitas dari variabel Y, maka hal-hal yang harus dilakukan oleh peneliti adalah mencari validitas praktis. Hal ini dilakukan dengan cara menguji cobakan instrument kepada siswa yang memiliki karakteristik yang sama dengan sampel penelitian. Adapun cara untuk mengukur validitas instrument variabel Y per item ialah dengan menggunakan korelasi product moment dari pearson. Rumus korelasi product moment, yaitu:

$$r_{xy} = \frac{n \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{(n \sum x^2 - (\sum x)^2)(n \sum y^2 - (\sum y)^2)}}$$

Keterangan:

r_{xy} : koefisien korelasi product moment

$\sum X$: jumlah skor distribusi X

$\sum Y$: jumlah skor distribusi Y

$\sum XY$: jumlah perkalian skor X dan Y

$\sum X^2$: jumlah kuadrat skor distribusi X

$\sum Y^2$: jumlah kuadrat skor distribusi Y

2. Reliabilitas Instrumen

Reliabilitas suatu alat pengukur adalah derajat keajegan dan ketepatan alat tersebut dalam mengukur apa saja yang diukurnya. Reliabilitas juga menunjukkan ada tingkat keterandalan sesuatu. Reliabilitas artinya dapat dipercaya. Konsep reliabilitas adalah sejauh mana instrument dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data. Untuk mencari reliabilitas variabel X, maka menggunakan rumus K-R 20, sebagai berikut :

Keterangan:

$$r_{11} = \frac{k}{k-1} \left(1 - \frac{\sum pq}{\sigma_t^2} \right)$$

r_{11} : Reliabilitas Instrumen

k : Banyaknya butir

V_t : Varians total

$\sum P_i q_i$: jumlah $P_i \times q_i$

Sedangkan untuk mencari reliabilitas variabel Y, maka menggunakan rumus *alpha cronbach*, sebagai berikut :

$$r = \frac{k}{k-1} \left[1 - \frac{\sum \sigma_i^2}{\sigma_t^2} \right]$$

keterangan :

r : reliabilitas instrumen

n : banyaknya butir pernyataan

$\sum \sigma_i^2$: jumlah varians butir

$\sum t^2$: jumlah varian total

F. Teknik Analisis Data

Untuk mengetahui hubungan pemahaman materi politik dengan budaya demokrasi siswa di SMA Negeri 5 Depok, digunakan rumus korelasi product moment pearson yaitu dengan menghubungkan variabel x dan variabel y.

Sebelum dilakukan uji hipotesis akan dilakukan terlebih dahulu uji persyaratan analisis data dengan menggunakan uji normalitas dan linieritas.

Hipotesis ajukan:

- H_0 : tidak terdapat hubungan antara pemahaman materi politik sebagai variabel bebas (x) dengan budaya demokrasi siswa sebagai variabel terikat (y)
- H_1 : terdapat hubungan antara pemahaman materi politik sebagai variabel bebas (x) dengan budaya demokrasi siswa sebagai variabel terikat (y)
- Teknik analisis data dilakukan dengan uji regresi dan uji korelasi dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mencari persamaan Regresi

Adapun rumus persamaan regresinya sebagai berikut:

$$\hat{Y} = a + bX$$

Dimana koefisien regresi b dan konstanta a dapat dicari dengan rumus:

$$b = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{n \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

$$a = \frac{(\sum Y)(\sum X^2) - (\sum X)(\sum XY)}{n \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

2. Pengujian Persyaratan Analisis

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik korelasi product moment uji normalitas (uji liliefors) untuk mengetahui normalitas data pada taraf signifikan (α) = 0,05. Rumus yang digunakan adalah :

$$L_0 = F(Z_i) - S(Z_i)$$

Keterangan:

L_0 : L observasi (harga mutlak terbesar)

$F(Z_i)$: peluang angka baku

$S(Z_i)$: proporsi angka baku

Hipotesis statistik :

H_0 = galat taksiran atas X berdistribusi normal

H_1 = galat taksiran atas X berdistribusi tidak normal

Jika $L_{hitung} < L_{tabel}$, maka H_0 diterima, berarti galat taksiran regresi Y atas X berdistribusi normal.

G. Uji Hipotesis Penelitian

a. Uji Keberartian Regresi

Uji keberartian regresi ini dilakukan untuk memperkirakan kaitan yang terjadi antara variabel X dan variabel Y. Digunakan untuk mengetahui apakah persamaan regresi yang diperoleh berarti atau tidak dengan kriteria $F_{hitung} > F_{tabel}$.

Dengan hipotesis statistik = $H_0 : \beta < 0$ (Regresi tidak berarti)

$$H_1 : \beta > 0 \text{ (Regresi Berarti)}$$

Kriteria pengujian keberartian regresi adalah:

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, H_0 ditolak, dan regresi dinyatakan berarti (signifikan).

b. Uji Linearitas Regresi

Uji linearitas regresi ini dilakukan untuk mengetahui apakah persamaan regresi tersebut berbentuk garis lurus. (Linier atau non linier).

Dengan hipotesis statistika = $H_0 : Y < \alpha + \beta X$

$$H_1 : Y > \alpha + \beta X$$

Kriteria pengujian linearitas regresi adalah:

Terima H_0 jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ dan tolak H_0 jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka persamaan regresi dibidang linear.

H_1 = regresi tidak linier, H_0 = regresi linier

Regresi dinyatakan linier jika berhasil menerima H_0 .

Tabel 3.5

Analisa Varians Regresi Linear Sederhana

Sumber Varians	Dk	Jumlah kuadrat (JK)	Rata-rata jumlah kuadrat (RJK)	F_{hitung}	F_{tabel}
Total	N	$\sum Y^2$	-	-	
Regresi	1	$(\sum Y)^2$	-		$F_o > F_t$
Regresi (b/a)	1	b. $\sum xy$	<u>JK (b/a)</u> 1	<u>S^2_{reg}</u> S^2_{res}	Maka regresi
Residu	n-2	Jk (s)	<u>JK(S)</u> n-2		berarti
Tuna Cocok	k-2	JK (TC)	<u>JK (TC)</u> k-2	<u>S^2_{TC}</u>	$F_o < F_t$ Maka
Galat kekeliruan	n-k	JK (G)	<u>JK (G)</u> n-k	S^2_G	regresi Linier

c. Menghitung Koefisien Korelasi product Moment

Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis menggunakan rumus Product Moment Corelation dari Karl Pearson, yaitu untuk menghubungkan Variabel X dan Variabel Y. Sebelum dilakukan hipotesis dilakukan terlebih dahulu uji persyaratan analisis data dengan menggunakan uji normalitas dan uji linearitas.

Rumus Product Moment Corellation:

$$r_{xy} = \frac{N \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{(N \sum x^2 - (\sum x)^2)(N \sum y^2 - (\sum y)^2)}}$$

Keterangan:

r_{xy} : Koefisien korelasi antara pemahaman materi politik dengan budaya demokrasi

X : Distribusi skor pemahaman materi politik

Y : Distribusi skor budaya demokrasi

$\sum x$: Jumlah skor pemahaman materi politik

$\sum y$: Jumlah skor budaya demokrasi

$\sum xy$: Jumlah skor distribusi x dan y

N : Jumlah sampel

Dengan ketentuan : 1. Data dibuat berpasangan, 2. Pengajuan hipotesis dengan menggunakan taraf signifikan (α) = 0,05.

Selanjutnya untuk menguji tingkat keberatan hubungan kedua variabel, maka digunakan uji t, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Uji - t} = \frac{r \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan: t : Nilai keberartian

r : Koefisien korelasi

n-2 : Derajat bebas

Ho ditolak, jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$

Ho diterima, jika $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$

d. Menghitung Koefisien Determinasi

Bertujuan untuk mengetahui persentasi besarnya variansi Y ditentukan oleh X, maka digunakan uji koefisien determinasi dengan rumus:

$$\text{KD} = r_{xy}^2 \times 100\%$$

Keterangan:

KD = Koefisien Determinasi

r_{xy}^2 = Koefisien Korelasi Product Moment

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data

Penelitian ini melibatkan dua variabel, yaitu Pemahaman Materi Politik sebagai variabel X, dan Budaya demokrasi sebagai variabel Y. Dalam penelitian

jumlah sampel sebanyak 40 responden, deskripsi data dari tiap–tiap variabel adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman Materi Politik (X)

Dari data yang telah dikumpulkan tentang Pemahaman Materi Politik (X) diperoleh 21 item pertanyaan yang valid sehingga rentang nilai empiriknya antara 6–23; harga Rata–rata sebesar 17,18; Median 18; Modus 20; dan Simpangan Bakunya 3,25. Distribusi Frekuensi serta Histogram data tersebut adalah sebagai berikut :

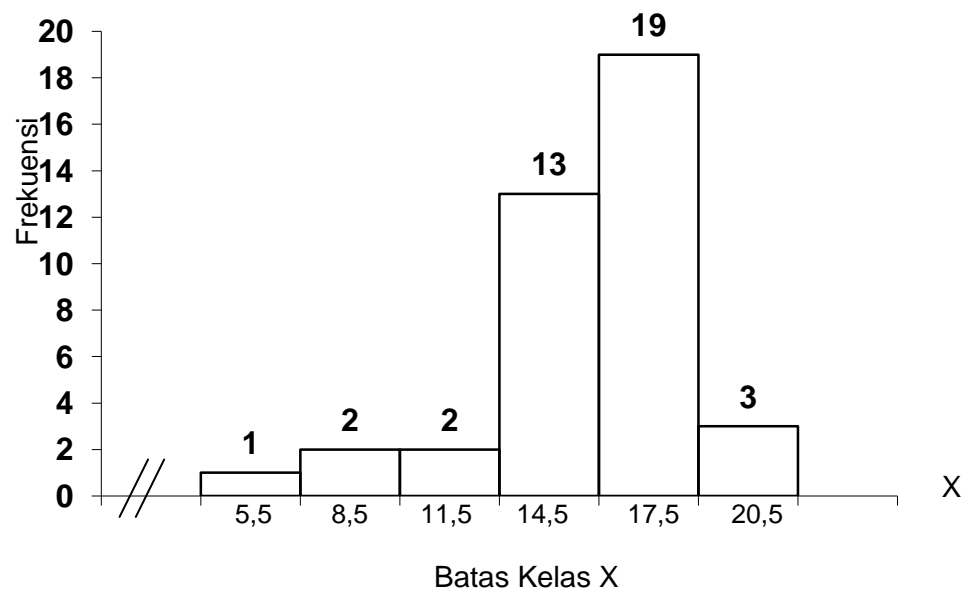
Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Pemahaman Materi Politik

Kelas Interval	Batas Bawah	Batas Atas	Frek. Absolut	Frek. Relatif
6 - 8	5.5	8.5	1	2.5%
9 - 11	8.5	11.5	2	5.0%
12 - 14	11.5	14.5	2	5.0%
15 - 17	14.5	17.5	13	32.5%
18 - 20	17.5	20.5	19	47.5%
21 - 23	20.5	23.5	3	7.5%
Jumlah			40	100%

Berdasarkan data di atas dapat diketahui kelompok tertinggi terdapat pada kelas interval kelima dengan rentang skor 18 – 20 yaitu sebanyak 19 responden atau 47,5%, sedangkan frekuensi terendah pada kelas interval pertama dengan rentang skor 6 – 8 yaitu sebanyak 1 responden atau 2,5 %. Sehingga dapat diketahui bahwa

jawaban responden berada pada kelas rata-rata karena skor rata-rata yaitu 17,18 berada pada rentang skor dengan frekuensi tertinggi.

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi dapat digambarkan dengan grafik histogram sebagai berikut :



Gambar 4.1 Histogram frekuensi Pemahaman Materi Politik

2. Budaya Demokrasi (Y)

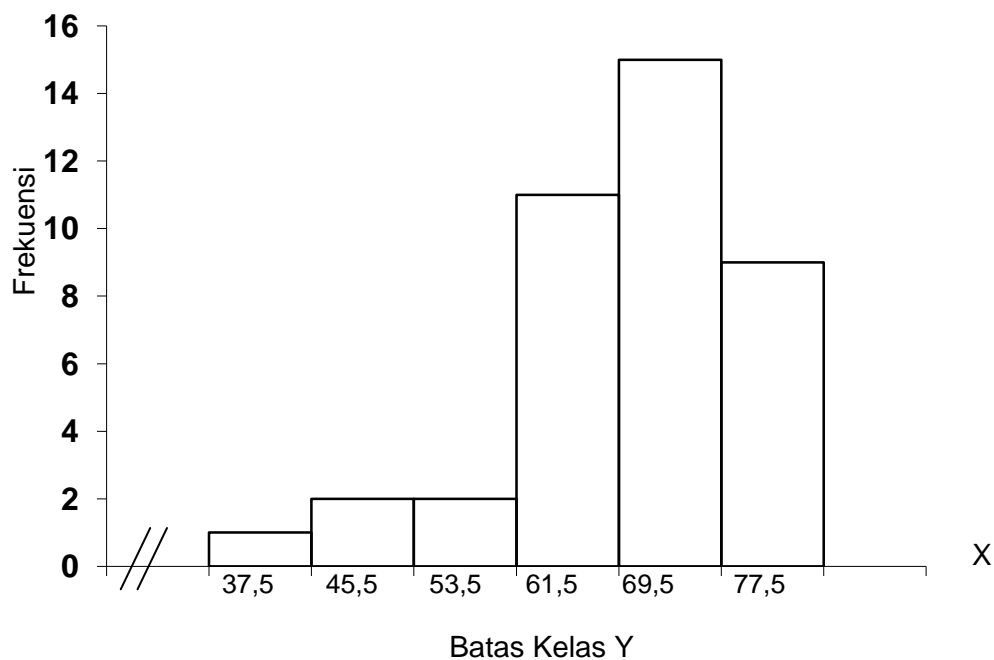
Dari data yang telah dikumpulkan tentang Budaya Demokrasi (Y) dengan diperoleh 23 item yang valid dengan jumlah responden 40 siswa di SMA Negeri 5 Depok, yaitu diperoleh rentang nilai empiriknya antara 38–85; harga rata-rata sebesar 70,78; Modus 75 ; Median 72,5; dan Simpangan Bakunya 8,87. Distribusi Frekuensi serta Histogram data tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Budaya Demokrasi

Kelas Interval	Batas Bawah	Batas Atas	Frek. Absolut	Frek. Relatif
38 - 45	37.5	45.5	1	2.5%
46 - 53	45.5	53.5	2	5.0%
54 - 61	53.5	61.5	2	5.0%
62 - 69	61.5	69.5	11	27.5%
70 - 77	69.5	77.5	15	37.5%
78 - 85	77.5	85.5	9	22.5%
Jumlah			40	100%

Berdasarkan data di atas dapat diketahui kelompok tertinggi terdapat pada kelas interval kelima dengan rentang skor 70–77 yaitu sebanyak 15 responden atau 37,5%, sedangkan frekuensi terendah pada kelas interval pertama dengan rentang skor 38–45 yaitu sebanyak 1 responden atau 2,5%. Sehingga dapat diketahui bahwa jawaban responden berada pada kelas rata–rata karena skor rata–rata yaitu 70,78 berada pada rentang skor dengan frekuensi tertinggi.

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi dapat digambarkan dengan grafik histogram sebagai berikut :



Gambar 4.2 Histogram Frekuensi Budaya demokrasi

Berdasarkan data penelitian di atas dapat dirangkum berdasarkan tabel sebagai berikut :

Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi

Keterangan	Pemahaman Materi	
	Politik	Budaya Demokrasi
N	40	40
Jumlah	687	2831
Rata-rata	17,18	70,78
Rentang	15	46
Skor Tertinggi	21	84
Skor Terendah	6	38
Varians	10,56	78,64

Simpangan Baku	3,25	8,87
Median	18	72,5
Modus	20	75

B. Pengujian Persyaratan Analisis

Sebelum Hipotesis diuji kebenarannya, terlebih dahulu dilakukan pengujian persyaratan, antara lain mengenal normalitas sampel dan linieritas. Pengujian tersebut dilakukan untuk mengetahui data hasil dari penelitian tersebut apakah sudah memenuhi persyaratan atau belum untuk uji statistik parametrik (uji koefisien korelasi).

1. Uji Normalitas

Pengujian Normalitas dan menggunakan Metode Lilliefors, apabila hasilnya menunjukkan $L_{hitung} < L_{tabel}$ maka H_0 diterima menyatakan bahwa sebaran skor berdistribusi normal diterima, dan sebaliknya H_1 diterima jika $L_{hitung} > L_{tabel}$ yang menyatakan bahwa sebaran skor tidak berdistribusi normal.

Berdasarkan hasil perhitungan untuk variabel Pemahaman Materi Politik diperoleh sebesar 0,124 sedangkan L_{tabel} untuk $n = 40$ dan taraf signifikansi (α) 0,05 sebesar 0,140. Sehingga $L_{hitung} < L_{tabel}$ dan H_0 yang menyatakan data berdistribusi normal diterima. Nilai L_{hitung} untuk variabel Budaya demokrasi diperoleh nilai L_{hitung} sebesar 0,112 sedangkan L_{tabel} untuk $n = 40$ dan taraf signifikansi (α) 0,05 sebesar

0,140. Sehingga $L_{hitung} < L_{tabel}$ dan H_0 yang menyatakan data berdistribusi normal diterima.

Berikut ini hasil perhitungan uji normalitas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.4 Hasil uji Normalitas

No.	Variabel	n	L_{hitung}	$L_{tabel(\alpha 0,05)}$	Kesimpulan
1.	X	40	0,124	0,140	<i>Normal</i>
2.	Y	40	0,112	0,140	<i>Normal</i>

Keterangan

L_{hitung} : Nilai Lilliefors angka maksimum

L_{tabel} : Tabel Lilliefors dengan taraf signifikansi 95 % atau $\alpha = 0,05$

Memperhatikan harga – harga L_{hitung} yang ada pada tabel di atas dan sesuai dengan ketentuan seperti tersebut di atas. Maka H_0 diterima untuk semua variabel yang menyatakan sebaran sampel mengikuti distribusi normal dapat diambil kesimpulan variabel X dan Variabel Y berdistribusi Normal.

2. Uji Linieritas

Pengujian Linieritas disajikan untuk mengetahui bahwa arah regresi linier atau tidak. Uji linieritas dilakukan dengan menggunakan uji F dimana H_0 diterima jika

$F_{hitung} < F_{tabel}$ yang artinya arah regresi linier, begitu sebaliknya $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan arah regresi tidak linier.

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui F_{hitung} sebesar 1,70 sedangkan nilai F_{tabel} dengan derajat kebebasan (dk) pembilang sebesar 10 dan derajat kebebasan penyebut sebesar 28, taraf signifikansi 0,05 diperoleh harga sebesar 2,19. F_{hitung} (1,70) $< F_{tabel(0,05;10/28)} = 2,19$ maka H_0 diterima sehingga dapat dikatakan regresi linier.

Berdasarkan hasil uji prasyarat analisis semua analisa terpenuhi yaitu data berdistribusi normal dan regresi linier, maka dapat dilanjutkan dengan menggunakan statistik parametrik atau menggunakan uji hipotesis dengan uji koefisien korelasi dan uji signifikansi dengan uji t.

Tabel 4.5

Hasil Uji Linearitas Regresi

N	α	Dk	F_{hitung}	$F_{tabel(0,05;10/28)}$	Keputusan
40	0,05	28	1,70	2,19	Regresi Linier

C. Pengujian Hipotesis

Langkah selanjutnya setelah dilakukan pengujian persyaratan analisis dan hasilnya sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, langkah berikutnya dilakukan pengujian hipotesis. Pengujian Hipotesis dalam penelitian ini dilakukan untuk

menarik suatu kesimpulan yang didukung oleh data empirik. Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan analisis korelasi dan regresi secara sederhana.

Uji Hipotesis H_0 yang berbunyi tidak terdapat hubungan positif antara Pemahaman Materi Politik dengan Budaya Demokrasi. Sedangkan H_1 yang berbunyi terdapat hubungan positif antara Pemahaman Materi Politik dengan Budaya Demokrasi.

Hubungan antara variabel Pemahaman Materi Politik (X) dengan Budaya demokrasi (Y) dilakukan analisis regresi sederhana. Hasil analisis regresi sederhana tersebut mendapatkan persamaan regresi $\hat{Y} = 43,64 + 1,580X$, untuk Pengujian Keberartian dan Linearitas Regresi digunakan tabel ANAVA sebagai berikut :

Tabel 4.6 Daftar ANAVA untuk uji Signifikasi dan Linearitas Regresi

$$\hat{Y} = 43,64 + 1,580X$$

Sumber Varians	Dk	Jumlah Kuadrat (JK)	Rata-rata Jumlah Kuadrat (RJK)	F_{hitung}	F_{tabel}
Total	40	203431.00			
Regresi (a)	1	200364.03			
Regresi (b/a)	1	1027.86	1027.86	19.15	4.10
Sisa	38	2039.11	53.66		

Tuna Cocok	10	770.67	77.07	1.70	2.19
Galat Kekeliruan	28	1268.44	45.30		

* : regresi signifikan , $F_{hitung} > F_{tabel} = 19,15 > 4,10$ pada $\alpha = 0,05$

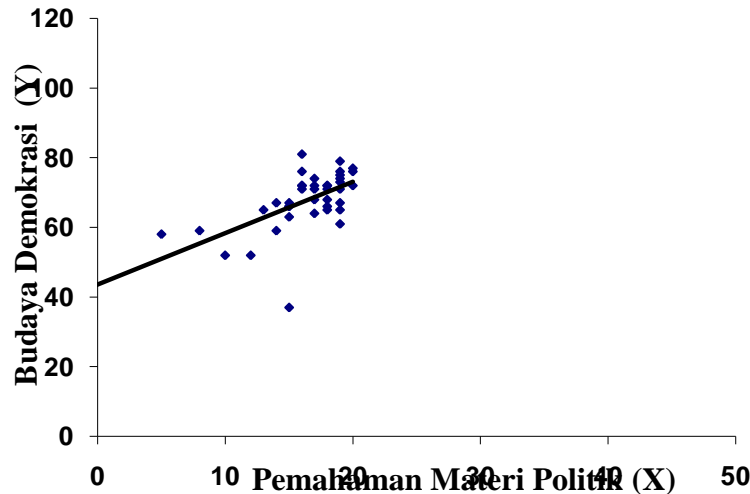
^{ns} : Regresi berbentuk liner $F_{hitung} < F_{tabel} = 1,70 < 2,19$ pada $\alpha = 0,05$

dk : Derajat Kebebasan

Dari Daftar ANAVA untuk uji keberatan dan linearitas regresi terlihat harga F_{hitung} sebesar 19,15 dan 1,70 apabila diambil taraf nyata $\alpha = 0,05$. maka untuk menguji hipotesis nol (I). yaitu dari daftar distribusi F dengan dk pembilang 1 dan dk penyebut 38 diperoleh $F_{tabel} \alpha = 0,05$ sebesar 4,10 ; dan untuk menguji hipotesis nol (II) dengan dk pembilang 10 dan dk penyebut 28 diperoleh $F_{tabel} \alpha = 0,05$ sebesar 2,19. dengan demikian hipotesis nol (I) ditolak karena F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} ; sehingga dapat dikatakan bahwa regresi adalah berarti. Hipotesis nol (II) diterima karena F_{hitung} lebih kecil dari F_{tabel} sehingga dapat dikatakan bahwa regresi linier.

Hasil pengujian yang ditunjukkan diatas menyimpulkan bahwa bentuk hubungan antara Pemahaman Materi Politik dengan Budaya Demokrasi Siswa adalah berarti dan linear. Persamaan regresi ini menunjukkan bahwa Pemahaman Materi Politik yang tinggi dapat menyebabkan Budaya Demokrasi siswa yang tinggi pula.

Hubungan antara Pemahaman Materi politik (X) dengan Budaya Demokrasi (Y) dengan menggunakan persamaan regresi $\hat{Y} = 43,64 + 1,580X$ dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :



Gambar 4.5. Regresi Pemahaman Materi Politik dengan Budaya Demokrasi

Pada persamaan regresi $\hat{Y} = 43,64 + 1,580X$ diinterpretasikan bahwa variabel Pemahaman Materi Politik (X) dengan Budaya Demokrasi (Y) diukur dengan instrumen yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya, maka setiap perubahan skor variabel Materi Politik (X) sebesar 1 point dapat diestimasikan skor Budaya Demokrasi (Y) akan berubah sebesar 1,580X pada arah yang sama, dengan konstanta sebesar 43,64.

Dari Hasil perhitungan korelasi product moment didapatkan koefisien korelasi r_{xy} antara Pemahaman Materi Politik (X) dengan Budaya Demokrasi (Y) koefisien korelasi 0,579. Setelah dilakukan pengujian keberatian korelasi dengan Uji-t

diperoleh t_{hitung} sebesar 4,38 Harga t_{tabel} pada distribusi 't' dengan taraf nyata $\alpha = 0,05$ untuk dk $(n-2) = 40-2 = 38$, diperoleh indeks t_{tabel} sebesar 1,68 oleh karena t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} yaitu $4,38 > 1,68$ berarti kofesian korelasi antara Pemahaman Materi Politik (X) dengan Budaya demokrasi (Y) signifikan pada taraf nyata $\alpha = 0,05$. Dengan demikian, Hipotesis nol (H_0) yang dinyatakan diatas ditolak ; sebaliknya hipotesis alternatif (H_1) diterima. Kesimpulan yang dapat diambil adalah terdapat hubungan positif dan signifikan antara Pemahaman Materi Politik (X) dengan Budaya demokrasi (Y). Dengan Demikian berarti, semakin tinggi Pemahaman Siswa tentang Materi Politik, maka semakin tinggi pula Budaya demokrasi Siswa.

Tabel 4.7

Pengujian Signifikasi Koefisien Korelasi Sederhana Antara X dan Y

Koefisien antara X dan Y	Koefisien Korelasi	Koefisien Determinasi	t_{hitung}	t_{tabel}
	0,579	0,3351	4,38	1,68

Berdasarkan koefisien korelasi tersebut dapat diperoleh koefisien determinasi r_{xy}^2 hubungan antara Pemahaman Materi Politik (X) dengan Budaya Demokrasi (Y) sebesar $(0,579)^2 = 0,3351$, kemudian dipresentasikan $0,3351 \times 100 \%$ maka didapat sebesar 33,51 %. Berarti 33,51 % variasi Budaya Demokrasi ditentukan oleh

Pemahaman Materi Politik dan selebihnya oleh faktor lain. Dengan Kata lain Pemahaman Materi Politik memberi dukungan besar terhadap Budaya Demokrasi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemahaman Materi Politik cukup berhubungan dengan Budaya Demokrasi.

Tabel 4.8

Pedoman Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,80 – 1,000	Sangat Tinggi
0,60 – 0,799	Tinggi
0,40 – 0, 599	Cukup Tinggi
0,20 – 0,399	rendah
0,00 – 0,199	Sangat Rendah

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil analisis korelasional menunjukkan bahwa antara variabel Pemahaman materi Politik (X) memiliki hubungan positif dengan Budaya Demokrasi (Y).

Hubungan Positif tersebut memiliki arti bahwa, seiring Pemahaman Materi Politik dengan Budaya Demokrasi. Dengan kata lain peningkatan Pemahaman Materi Politik diikuti dengan meningkatnya Budaya demokrasi Siswa. Hubungan yang demikian berarti juga bahwa, Pemahaman Materi Politik dapat ditelusuri, dijelaskan, atau bahkan diramalkan dengan Budaya Demokrasi.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, hipotesis alternatif yang diajukan secara signifikan dapat diterima. Uraian hipotesis yang dimaksud dapat diketahui bahwa pengujian hipotesis menyimpulkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara Pemahaman tentang materi politik dengan Budaya Demokrasi yang ditunjukkan oleh nilai t_{hitung} sebesar 4,38 lebih besar dari $t_{tabel (0,05;38)}$ 1,68. Pola hubungan antara kedua variabel ini dinyatakan oleh persamaan regresi $\hat{Y} = 43,64 + 1,580X$. Persamaan satu tingkat Pemahaman Materi Politik akan dapat mengakibatkan terjadinya perubahan pada Budaya demokrasi sebesar 1,580 pada konstanta 43,64. Hasil analisis korelasi sederhana antara Pemahaman Materi Politik dengan Budaya demokrasi diperoleh nilai koefisien korelasi r_{xy} sebesar 0,579.

Nilai ini memberikan pengertian bahwa keterkaitan antara Pemahaman Materi Politik dengan Budaya demokrasi adalah signifikan dan positif, artinya makin tinggi Pemahaman Materi Politik akan diikuti dengan tingginya Budaya Demokrasi tersebut. Yaitu dapat dikatakan kenaikan 1 point Pemahaman Materi Politik dapat mengakibatkan kenaikan Budaya Demokrasi sebesar 1,580 pada konstanta 43,64.

Besarnya sumbangan atau kontribusi variabel Pemahaman Materi Politik terhadap Budaya Demokrasi dapat diketahui dengan cara mengkuadratkan perolehan nilai koefisien korelasi sederhananya adalah sebesar 0,3351. Secara statistik nilai ini memberikan pengertian bahwa kurang lebih 33,51 persen(%)

variasi Budaya Demokrasi siswa ditentukan/dijelaskan oleh Pemahaman Materi politik dengan pola hubungan fungsionalnya seperti ditunjukkan oleh persamaan regresi tersebut di atas.

E. Keterbatasan Penelitian

Berbagai upaya telah dilakukan dalam penelitian ini, namun masih terdapat keterbatasan–keterbatasan yang tidak dapat dihindari, antara lain :

1. Kelemahan dalam pelaksanaan pengumpulan data yang sulit dihindari, antara lain karena responden merasa tidak berkepentingan dalam penelitian ini, apalagi tidak ada hubungan ataupun pengaruh terhadap penambahan nilai atau hasil di sekolah, sehingga dalam menjawab pertanyaan atau pernyataan tidak dilakukan secara maksimal.
2. Waktu yang digunakan untuk mengisi angket oleh setiap responden sangat singkat, sementara jumlah butir dari semua instrumen yang harus dijawab cukup banyak, sehingga waktu yang diberikan sangat terbatas dan dituntut mengisi angket dengan cepat. Dalam kondisi ini dengan sendirinya pikiran dan perasaan responden tidak terkonsentrasi secara penuh untuk menjawab pertanyaan instrumen secara baik.
3. Untuk variabel (X) Pemahaman Materi Politik, karena pemahaman merupakan variabel konten dan konsep politik sangat luas. Maka penelitian hanya terbatas pada pokok bahasan yaitu tentang materi politik saja.

4. Dalam membahas aspek budaya yang luas, untuk variabel (Y) Budaya Demokrasi peneliti hanya terkonsentrasi pada perilaku demokrasi. Sehingga pengukuran Budaya Demokrasi hanya dilihat dari skala perilaku siswa.

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pengolahan data, pengetahuan deskripsi, analisis dan interpretasi data yang dilakukan dan telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara Pemahaman Materi Politik dengan Budaya demokrasi siswa di SMA NEGERI 5 DEPOK. Maka dapat disimpulkan jika Pemahaman Materi Politik semakin tinggi maka Budaya Demokrasi akan semakin tinggi pula, sebaliknya jika Pemahaman siswa tentang Materi Politik rendah maka Budaya Demokrasi siswa menjadi rendah pula.

Telah diketahui bahwa, hasil penelitian ini dapat disimpulkan ada hubungan yang positif antara tingkat Pemahaman Materi Politik dengan Budaya Demokrasi siswa kelas XI di SMAN 5 DEPOK. Hal ini ditunjukkan dengan hasil pengujian hipotesis yang diperoleh r_{hitung} sebesar 0,579 yang lebih besar pada r_{tabel} pada taraf signifikan 0,05 (5%) dan $n = 40$ sebesar 0,312 ($0,579 > 0,312$).

Besarnya derajat hubungan kedua variabel dapat dilihat dari besarnya angka koefisien determinasi sebesar 33,51%. Sedangkan keberartian hubungan kedua

variabel tersebut dapat dilihat dari nilai t_{hitung} yang lebih besar dari t_{tabel} ($4,38 > 1,68$).

Ini menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel sangat berarti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 33,51% variasi budaya demokrasi ditentukan oleh pemahaman materi politik siswa kelas XI SMAN 5 Depok, dan selebihnya ditentukan oleh faktor lain.

B. Saran

❖ Bagi kepala sekolah

Sebaiknya kepala sekolah, agar lebih dapat mengembangkan sekolah yang demokratis dimasa mendatang.

❖ Bagi guru

Sebaiknya seorang guru mampu lebih mengembangkan materi tentang politik dalam wujud menciptakan siswa yang memiliki perilaku demokrasi dan mengembangkan budaya demokrasi di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat.

❖ Bagi calon peneliti

Sebaiknya kajian dan permasalahan tentang keberlangsungan dari demokrasi dan politik masih sangat luas, sekiranya hasil penelitian ini dapat menjadi semangat untuk melakukan penelitian terhadap demokrasi yang saat ini sedang berkembang di Negara Indonesia.

❖ Bagi siswa

Sebaiknya siswa dalam memandang demokrasi dan politik hendaknya jangan dipandang dengan sebelah mata, demokrasi dan politik bukan hanya pembahasan bagi para orang dewasa atau elite politik saja, tetapi juga demokrasi menjadi bahasan para siswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta : Bumi aksara, 2009.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta, 2006.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Pustaka Utama, 2007.
- Budiardjo, Miriam. *Demokrasi di Indonesia Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Budiardjo, Miriam. *Teori-teori Politik Dewasa Ini*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dimiyati dan Mudjiono. *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta : Rineka Cipta, 2006.
- Gie, The Liang. *Ilmu Politik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1982.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta : Aksara Baru, 1986.
- MacAndrews, Colin dan Mohtar Mas' oed. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada Press, 1995.
- Nazaruddin, Sjamsuddin. *Profil Budaya Politik Indonesia*. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1991.
- Sahid, Komarudin. *Memahami Sosiologi Politik*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2011.
- Sanjaya, Wina. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta : Prenada Media Group, 2006.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta, 2010.

Sastroatmodjo, Sudijono. *Perilaku Politik*. Semarang : IKIP Semarang Press, 1995.

Varma, S.P. *Teori Politik Modern*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007.

Winarno. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta : Bumi Aksara, 2009.

Wuryan, Sri dan Syaifullah. *Ilmu Kewarganegaraan (CIVICS)*. Bandung : Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan UPI, 2008.

Sumber Internet :

Edward Burnett Tylor dikutip Muhammad, *Budaya*

Organisasi.<http://zanikhan.multiply.com/journal/item/1065>. (Diakses tanggal 10 Maret 2012).

Pengertian Budaya, <http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya>. (Diakses tanggal 10 Maret 2012).

Lampiran 4

ANGKET UJI COBA VALIDITAS

Identitas Responden

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Kelas :

Petunjuk pengisian angket.

1. Bacalah beberapa pertanyaan dan beberapa petunjuk pengisian angket berikut ini secara teliti sebelum kamu menetapkan pilihan jawaban.
2. Jawablah beberapa pertanyaan pilihan ganda berikut ini dengan cara :

Memberikan tanda silang (x) a, b, c, d, dan e pada beberapa alternatif jawaban yang tersedia sesuai dengan yang anda ketahui.

PERTANYAAN PILIHAN GANDA MENGENAI PEMAHAMAN MATERI**POLITIK (VARIABEL X)**

1. Budaya politik adalah aspek politik dan nilai-nilai yang terdiri atas pengetahuan, adat istiadat, tahayul, dan mitos yang salah satu fungsinya adalah.....
 - a. Memberikan alasan rasional untuk menolak atau menerima nilai-nilai dan norma lain.

- b. Memberi landasan hukum untuk mengembangkan sistem politik
 - c. Mengembangkan kelembagaan politik
 - d. Sebagai pertimbangan untuk menentukan keputusan
 - e. Memberi motivasi untuk berpartisipasi politik
2. Pandangan politik yang memengaruhi sikap, orientasi, dan pilihan politik seseorang menurut Marbun disebut....
- a. Sistem politik
 - b. Objek politik
 - c. Orientasi politik
 - d. Budaya politik
 - e. Partai politik
3. Pola perilaku masyarakat dalam kehidupan bernegara, politik pemerintahan, dan penyelenggaraan administrasi negara merupakan bagian dari budaya....
- a. Sosial
 - b. Politik
 - c. Negara
 - d. Pemerintahan
 - e. Demokrasi
4. Salah satu objek orientasi politik meliputi keterlibatan seseorang terhadap proses input yaitu meliputi intensitas pengetahuan dan perbuatan tentang....
- a. Intensitas pengetahuan dan perbuatan tentang proses penyaluran segala tuntutan yang diajukan atau diorganisasi oleh masyarakat
 - b. Intensitas pengetahuan dan perbuatan tentang proses aktivitas berbagai cabang pemerintahan

- c. Intensitas pengetahuan dan perbuatan seseorang dalam mengambil peranan di arena sistem politik
 - d. Intensitas pengetahuan yang ditandai oleh apresiasi terhadap persoalan kekuasaan dan karakteristik konstitusi negara
 - e. Intensitas pengetahuan dan perbuatan tentang fungsi pelaksanaan aturan oleh eksekutif
5. Objek orientasi politik meliputi keterlibatan seseorang terhadap input yang meliputi....
- a. Fungsi peradilan
 - b. Fungsi eksaminatif
 - c. Proses penyaluran segala tuntutan
 - d. Fungsi pembuatan aturan atau perundang-undangan oleh badan legislatif
 - e. Fungsi pelaksanaan aturan oleh eksekutif
6. Berikut ini merupakan fungsi partai politik, *kecuali*...
- a. Sosialisasi politik
 - b. Mewujudkan konsensus nasional
 - c. Pendidikan politik
 - d. Menguasai negara
 - e. Sarana aspirasi masyarakat
7. Budaya politik yang ditandai oleh anggota masyarakat yang aktif dalam kehidupan politik disebut budaya politik...
- a. Parokial
 - b. Partisipan

- c. Kaula
 - d. Modern
 - e. Tradisional
8. Keseluruhan pandangan-pandangan politik, seperti norma-norma dan pola-pola orientasi terhadap politik disebut....
- a. Sistem organisasi
 - b. Organisasi politik
 - c. Otoritas politik
 - d. Partisipasi politik
 - e. Budaya politik
9. Budaya politik merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki....
- a. Bersama oleh masyarakat
 - b. Individu dalam masyarakat
 - c. Negara demokrasi
 - d. Partai politik
 - e. Lembaga negara
10. Yang bukan indikator yang menunjukkan bahwa budaya politik Indonesia masih bersifat primordialisme adalah....
- a. Kuatnya toleransi hidup beragama
 - b. Masih kuatnya sentimen kedaerahan
 - c. Masih kuatnya sentimen kesukuan
 - d. Masih kuatnya sentimen keagamaan
 - e. Perbedaan pendekatan terhadap keagamaan tertentu
11. Yang bukan merupakan ciri-ciri budaya politik sebagai bagian dari kebudayaan masyarakat adalah....
- a. Budaya politik menyangkut masalah legitimasi
 - b. Pengaturan kekuasaan

- c. Proses pembuatan kebijakan pemerintah
 - d. Kegiatan partai politik
 - e. Kegiatan pemerintahan
12. Yang tidak termasuk objek orientasi politik yang meliputi keterlibatan seseorang terhadap sistem politik secara keseluruhan adalah....
- a. Intensitas pengetahuan
 - b. Proses pengambilan keputusan
 - c. Persoalan kekuasaan
 - d. Karakteristik konstitusional negara
 - e. Ungkapan perasaan terhadap sejarah
13. Demokrasi pancasila yang dianut Indonesia mempunyai karakteristik tersendiri sehingga berbeda dengan demokrasi lain yaitu...
- a. Menonjolkan hak individu
 - b. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
 - c. Menonjolkan kewajiban
 - d. Mengutamakan hak dari pada kewajiban
 - e. Salalu mufakat dalam setiap pengambilan keputusan
14. Anggota masyarakat mempunyai minat, perhatian, mungkin pula kesadaran terhadap sistem sebagai keseluruhanama segi outputnya merupakan ciri dari tipe budaya politik...
- a. Canggih
 - b. Parokial
 - c. Kaula
 - d. Partisipan

- e. Semuanya benar
15. Adanya perilaku yang menganggap dirinya ataupun orang lain sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik merupakan ciri tipe budaya politik....
- a. Partisipan
 - b. Campuran
 - c. a dan b
 - d. parokial
 - e. kaula
16. Di bawah ini yang bukan salah satu ciri dari budaya politik yang bersifat akomodatif adalah....
- a. Ia dapat melepaskan ikatan tradisi
 - b. Kritis terhadap diri sendiri
 - c. Bersedia menilai kembali tradisi berdasarkan perkembangan masa kini
 - d. Tradisi selalu dipertahankan dengan segala kebaikan dan keburukan
 - e. Perubahan bukan dianggap sebagai suatu penyimpangan
17. Yang bukan merupakan indikator bahwa budaya politik Indonesia cenderung paternalisme dan patrimonial adalah...
- a. Pemimpin sangat dominan dalam setiap keputusan
 - b. Rakyat berpartisipasi dalam setiap pengambilan keputusan
 - c. Bapakisme
 - d. Sikap asal bapak senang
 - e. Menggantungkan keputusan dari atas
18. Yang bukan termasuk hal-hal yang menyangkut proses output dalam suatu sistem politik adalah....

- a. Fungsi pembuatan aturan atau UU oleh legislatif
- b. Fungsi pelaksanaan aturan oleh eksekutif (termasuk birokrasi)
- c. Proses penyaluran segala tuntutan
- d. Fungsi peradilan
- e. Fungsi eksaminatif
19. Pada umumnya, dalam sistem politik terdapat beberapa variabel. Di bawah ini yang bukan merupakan salah satu variabel dari sistem politik adalah...
- a. Budaya politik
- b. Organisasi politik
- c. Kekuasaan
- d. Kepentingan
- e. Kebijakan
20. Objek orientasi politik meliputi keterlibatan seseorang antara lain terhadap diri sendiri. Yang bukan termasuk dalam pernyataan tersebut adalah...
- a. Frekuensi perebutan seseorang dalam mengambil peranan
- b. Jabatan yang pernah diemban seorang individu
- c. Intensitas pengetahuan
- d. Cara untuk meningkatkan pengaruhnya sendiri
- e. Apakah yang menjadi hak, kekuasaan, dan kewajiban
21. Seorang ilmuwan yang sangat berperan dalam mengembangkan teori budaya politik adalah....
- a. Aristoteles
- b. Gabriel Almond dan Sidney Verba
- c. Colin MacAndrews
- d. Thomas hobbes
- e. Alfian

22. Salah satu wujud budaya politik adalah aktifitas atau tindakan berpola dari masyarakat dalam melakukan kegiatan-kegiatan politik. yang bukan contoh dari pernyataan di atas adalah...
- Pelaksanaan tata kerja lembaga pemerintah
 - Kegiatan pemungutan suara untuk pemilihan presiden
 - Kegiatan kampanye partai politik
 - Pelaksanaan sidang kabinet
 - Sistem pemerintahan negara
23. Ciri yang menonjol dari negara demokrasi adalah diakuinya partisipasi rakyat dalam pemerintahan yang perwujudannya dapat berupa...
- Penyampaian kritik terhadap kebijakan pemerintah
 - Berdemo untuk memaksakan kehendak
 - Menuntut adanya kebebasan yang mutlak
 - Memberi dukungan kepada TNI dan POLRI
 - Memberi simpati pada pemerintah
24. Berikut ini contoh objek politik yang termasuk objek output...
- | | |
|----------------|--------------|
| a. Tuntutan | d. Kebijakan |
| b. Dukungan | e. Aparat |
| c. Kepentingan | |
25. Berikut ini contoh orientasi afektif warga terhadap suatu objek politik....
- Hormat kepada kepala desa
 - Memahami tentang adat istiadat sukunya

- c. Mengetahui cara kerja pemerintahan desa
 - d. Mengevaluasi kinerja kepala desa
 - e. Simpati terhadap kegiatan organisasi kepemudaan desa
26. Berikut ini merupakan indikasi yang biasa dipakai untuk menilai intensitas pertentangan partai politik dalam suatu masyarakat, *kecuali*....
- a. Demonstrasi
 - b. Kerusuhan
 - c. Kesepakatan
 - d. Serangan bersenjata
 - e. Banyaknya jumlah kematian akibat kekerasan politik
27. Di bawah ini yang bukan salah satu contoh budaya fisik adalah...
- a. Tanda gambar partai politik
 - b. Gambar kontestan pemilu
 - c. Kartu pemilih
 - d. Bilik pemungutan suara
 - e. Peraturan uu mengenai pemilu
28. Budaya politik merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat dengan ciri-ciri yang lebih khas, yang bukan merupakan ciri budaya politik adalah....
- a. Budaya politik menyangkut masalah legitimasi
 - b. Pengaturan kekuasaan
 - c. Proses pembuatan keputusan
 - d. Kegiatan parpol
 - e. Proses pendirian parpol
29. Di bawah ini yang bukan termasuk konsep-konsep pokok dalam politik menurut Prof. Miriam Budiardjo adalah...
- a. Pengambilan keputusan
 - b. Kekuasaan
 - c. Negara
 - d. Kebijakan umum
 - e. Partai politik

30. Karakteristik demokrasi pancasila yang membedakan dengan demokrasi lain antara lain adalah...

- a. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
- b. Menonjolkan hak individu
- c. Menonjolkan kewajiban sebagai warga negara
- d. Mengutamakan hak
- e. Salalu mufakat dalam keputusan

KUNCI JAWABAN SOAL PILIHAN GANDA

1. A
2. D
3. B
4. A
5. C
6. D
7. B
8. E
9. A
10. A
11. E
12. B
13. B
14. C
15. A
16. D
17. B
18. C
19. B
20. B
21. B

22. E

23. A

24. D

25. E

26. C

27. E

28. E

29. E

30. A

ANGKET UJI COBA VALIDITAS

Identitas Responden

4. Nama :
5. Jenis kelamin :
6. Kelas :

Petunjuk pengisian angket.

3. Bacalah beberapa pertanyaan dan beberapa petunjuk pengisian angket berikut ini secara teliti sebelum kamu menetapkan pilihan jawaban.
4. Jawablah beberapa pertanyaan berikut ini dengan cara :

Memberikan tanda checklist (\checkmark) pada beberapa alternative jawaban yang tersedia sesuai dengan kondisi objektif yang ada pada sekolah.

Keterangan :

1. SS : Sangat Sering
2. S : Sering
3. KD : Kadang-kadang
4. TP : Tidak pernah

PERNYATAAN ANGKET MENGENAI BUDAYA DEMOKRASI SISWA
(VARIABEL Y).

NO.	PERNYATAAN	SS	S	KD	TP
1.	Saya bergaul sekalipun dengan orang yang berbeda suku dan agama.				
2.	Saya menghormati antar umat beragama.				
3.	Saya membedakan teman bermain dari status ekonomi keluarganya.				
4.	Terkadang saya meremehkan orang lain.				
5.	Saya tidak mengobrol saat guru sedang menjelaskan materi.				
6.	Saya menghargai pendapat orang lain walaupun berbeda pendapat dengan saya.				
7.	Saya menolak apabila ada yang berbeda pendapat dengan saya.				
8.	Saya berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi kelompok.				
9.	Saya melakukan diskusi dengan guru ketika proses pembelajaran berlangsung.				
10.	Saya mengikuti musyawarah di sekolah atau di kelas setiap kali ada pembahasan.				
11.	Saya bertengkar atau berselisih di dalam forum diskusi.				
12.	Saya tidak berkelahi atau membuat				

	keributan di sekolah.				
13.	Saya dibatasi oleh pihak lain, dalam hal mengemukakan pendapat.				
14.	Saya mengemukakan pertanyaan kepada guru dengan baik dalam proses pembelajaran.				
15.	Saya dihalangi melihat hasil yang dicapai dari musyawarah.				
16.	Saya menjalankan dengan baik, dan bertanggung jawab mengenai hasil dari musyawarah meskipun berbeda pendapat dengan saya.				
17.	Di sekolah mengadakan pemilihan ketua OSIS secara berkala				
18.	Saya menaati tata tertib di kelas dan sekolah.				
19.	Saya melaksanakan kewajiban sebagai warga negara yang baik.				
20.	Saya mengikuti kegiatan upacara bendera.				
21.	Saya bermain kotor atau curang agar pendapat saya diterima orang lain.				

22.	Saya membela kebenaran, jika orang lain dinyatakan bersalah yang tidak terbukti kesalahannya.				
23.	Saya menjadi orang sukses dimasa akan datang.				
24.	Saya mengikuti dan aktif dalam kegiatan organisasi intra dan ekstra di sekolah.				
25.	Saya tidak dapat menyelesaikan masalah yang ada dalam diri saya.				
26.	Saya terlibat dalam hal pemecahan masalah yang ada di forum diskusi.				
27.	Saya menolong sesama jika ia sedang menghadapi masalah.				
28.	Saya menikmati kebersamaan dengan teman.				
29.	Saya menggunakan hak dan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Contoh : pemilihan ketua kelas, ketua osis, dll.				
30.	Dalam melaksanakan tugas kelompok, saya melakukan dengan baik.				

Lampiran 5

ANGKET PENELITIAN VALIDITAS

Identitas Responden

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Kelas :

Petunjuk pengisian angket.

1. Bacalah beberapa pertanyaan dan beberapa petunjuk pengisian angket berikut ini secara teliti sebelum kamu menetapkan pilihan jawaban.

2. Jawablah beberapa pertanyaan pilihan ganda berikut ini dengan cara :

Memberikan tanda silang (x) a, b, c, d, dan e pada beberapa alternatif jawaban yang tersedia sesuai dengan yang anda ketahui.

**PERTANYAAN PILIHAN GANDA MENGENAI PEMAHAMAN MATERI
POLITIK (VARIABEL X)**

1. Budaya politik adalah aspek politik dan nilai-nilai yang terdiri atas pengetahuan, adat istiadat, tahayul, dan mitos yang salah satu fungsinya adalah....
 - a. Memberikan alasan rasional untuk menolak atau menerima nilai-nilai dan norma lain.
 - b. Memberi landasan hukum untuk mengembangkan sistem politik
 - c. Mengembangkan kelembagaan politik
 - d. Sebagai pertimbangan untuk menentukan keputusan
 - e. Memberi motivasi untuk berpartisipasi politik

2. Pandangan politik yang memengaruhi sikap, orientasi, dan pilihan politik seseorang menurut Marbun disebut....
 - a. Sistem politik
 - b. Objek politik
 - c. Orientasi politik
 - d. Budaya politik
 - e. Partai politik

3. Pola perilaku masyarakat dalam kehidupan bernegara, politik pemerintahan, dan penyelenggaraan administrasi negara merupakan bagian dari budaya.....
 - a. Sosial
 - b. Politik
 - c. Negara
 - d. Pemerintahan
 - e. Demokrasi

4. Salah satu objek orientasi politik meliputi keterlibatan seseorang terhadap proses input yaitu meliputi intensitas pengetahuan dan perbuatan tentang.....
 - a. Intensitas pengetahuan dan perbuatan tentang proses penyaluran segala tuntutan yang diajukan atau diorganisasi oleh masyarakat
 - b. Intensitas pengetahuan dan perbuatan seseorang dalam mengambil peranan diarena sistem politik
 - c. Intensitas pengetahuan dan perbuatan tentang proses aktivitas berbagai cabang pemerintahan
 - d. Intensitas pengetahuan yang ditandai oleh apresiasi terhadap persoalan kekuasaan dan karakteristik konstitusi negara
 - e. Intensitas pengetahuan dan perbuatan tentang fungsi pelaksanaan aturan oleh eksekutif

5. Berikut ini merupakan fungsi partai politik, *kecuali*.....
 - a. Sosialisasi politik
 - b. Mewujudkan consensus nasional
 - c. Pendidikan politik
 - d. Menguasai negara
 - e. Sarana aspirasi masyarakat

6. Keseluruhan pandangan-pandangan politik, seperti norma-norma dan pola-pola orientasi terhadap politik disebut....
- a. Sistem organisasi
 - b. Organisasi politik
 - c. Otoritas politik
 - d. Partisipasi politik
 - e. Budaya politik
7. Budaya politik merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki....
- a. Bersama oleh masyarakat
 - b. Individu dalam masyarakat
 - c. Negara demokrasi
 - d. Partai politik
 - e. Lembaga negara
8. Yang tidak termasuk objek orientasi politik yang meliputi keterlibatan seseorang terhadap sistem politik secara keseluruhan adalah....
- a. Intensitas pengetahuan
 - b. Proses pengambilan keputusan
 - c. Karakteristik konstitusional negara
 - d. Persoalan kekuasaan
 - e. Ungkapan perasaan terhadap sejarah
9. Demokrasi pancasila yang dianut Indonesia mempunyai karakteristik tersendiri sehingga berbeda dengan demokrasi lain yaitu....
- a. Menonjolkan hak individu
 - b. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
 - c. Menonjolkan kewajiban
 - d. Mengutamakan hak daripada kewajiban
 - e. Salalu mufakat dalam setiap pengambilan keputusan

10. Anggota masyarakat mempunyai minat, perhatian, mungkin pula kesadaran terhadap sistem sebagai keseluruhan segi outputnya merupakan ciri dari tipe budaya politik....
- a. Canggih
 - b. Parokial
 - c. Kaula
 - d. Partisipan
 - e. Semuanya benar
11. Adanya perilaku yang menganggap dirinya ataupun orang lain sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik merupakan ciri tipe budaya politik....
- a. Partisipan
 - b. Campuran
 - c. a dan b
 - d. Parokial
 - e. Kaula
12. Yang bukan merupakan indikator bahwa budaya politik Indonesia cenderung paternalism dan patrimonial adalah....
- a. Pemimpin sangat dominan dalam setiap keputusan
 - b. Rakyat berpartisipasi dalam setiap pengambilan keputusan
 - c. Bapakisme
 - d. Sikap asal bapak senang
 - e. Menggantungkan keputusan dari atas
13. Yang bukan termasuk hal-hal yang menyangkut proses output dalam suatu sistem politik adalah...
- a. Fungsi pembuatan aturan atau UU oleh legislatif
 - b. Fungsi pelaksanaan aturan oleh eksekutif (termasuk birokrasi)
 - c. Proses penyaluran segala tuntutan
 - d. Fungsi peradilan
 - e. Fungsi eksaminatif

14. Pada umumnya, dalam sistem politik terdapat beberapa variabel. Di bawah ini yang bukan merupakan salah satu variabel dari sistem politik adalah....
- a. Budaya politik
 - b. Organisasi politik
 - c. Kekuasaan
 - d. Kepentingan
 - e. Kebijakan
15. Seorang ilmuwan yang sangat berperan dalam mengembangkan teori budaya politik adalah....
- a. Aristoteles
 - b. Gabriel Almond dan Sidney Verba
 - c. Collin MacAndrews
 - d. Thomas hobbes
 - e. Alfian
16. Berikut ini contoh objek politik yang termasuk objek output adalah...
- a. Tuntutan
 - b. Dukungan
 - c. Kepentingan
 - d. Kebijakan
 - e. Aparat
17. Berikut ini contoh orientasi afektif warga terhadap suatu objek politik adalah....
- a. Hormat kepada kepala desa
 - b. Memahami tentang adat istiadat sukunya
 - c. Mengetahui cara kerja pemerintahan desa
 - d. Mengevaluasi kinerja kepala desa
 - e. Simpati terhadap kegiatan organisasi kepemudaan desa

18. Berikut ini merupakan indikasi yang biasa dipakai untuk menilai intensitas pertentangan partai politik dalam suatu masyarakat, *kecuali*.....

- a. Demonstrasi
- b. Kerusuhan
- c. Kesepakatan
- d. Serangan bersenjata
- e. Banyaknya jumlah kematian akibat kekerasan politik

19. Di bawah ini yang bukan salah satu contoh budaya fisik adalah....

- a. Tanda gambar partai politik
- b. Gambar kontestan pemilu
- c. Kartu pemilih
- d. Bilik pemungutan suara
- e. Peraturan UU mengenai pemilu

20. Di bawah ini yang bukan termasuk konsep-konsep pokok dalam politik menurut Prof. Miriam Budiardjo adalah...

- a. Pengambilan keputusan
- b. Kekuasaan
- c. Negara
- d. Kebijakan umum
- e. Partai politik

21. Karakteristik demokrasi pancasila yang membedakan dengan demokrasi lain antara lain adalah....

- a. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
- b. Menonjolkan hak individu
- c. Menonjolkan kewajiban sebagai warga negara
- d. mengutamakan hak
- e. selalu mufakat dalam keputusan

Identitas Responden

7. Nama :

8. Jenis kelamin :

9. Kelas :

Petunjuk pengisian angket.

5. Bacalah beberapa pertanyaan dan beberapa petunjuk pengisian angket berikut ini secara teliti sebelum kamu menetapkan pilihan jawaban.

6. Jawablah beberapa pertanyaan berikut ini dengan cara :

Memberikan tanda checklist (\checkmark) pada beberapa alternative jawaban yang tersedia sesuai dengan kondisi objektif yang ada pada sekolah.

Keterangan :

5. SS : Sangat Sering

6. S : Sering

7. KD : Kadang-kadang

8. TP : Tidak pernah

PERNYATAAN ANGKET MENGENAI BUDAYA DEMOKRASI SISWA
(VARIABEL Y).

NO.	PERNYATAAN	SS	S	KD	TP
1.	Saya bergaul sekalipun dengan orang yang berbeda suku dan agama				
2.	Saya menghormati antar umat beragama.				
3.	Saya membedakan teman bermain dari status ekonomi keluarganya.				
4.	Saya tidak mengobrol saat guru sedang menjelaskan materi.				
5.	Saya menghargai pendapat orang lain walaupun berbeda pendapat dengan saya.				
6.	Saya menolak apabila ada yang berbeda pendapat dengan saya.				
7.	Saya melakukan diskusi dengan guru ketika proses pembelajaran berlangsung.				
8.	Saya mengikuti musyawarah di sekolah atau di kelas setiap kali ada pembahasan.				
9.	Saya bertengkar atau berselisih di dalam forum diskusi.				
10.	Saya tidak berkelahi atau membuat keributan di sekolah.				

11.	Saya mengemukakan pertanyaan kepada guru dengan baik dalam proses pembelajaran.				
12.	Saya dihalangi melihat hasil yang dicapai dalam musyawarah				
13.	Saya menjalankan dengan baik, dan bertanggung jawab mengenai hasil dari musyawarah meskipun berbeda pendapat dengan saya.				
14.	Di sekolah mengadakan pemilihan ketua OSIS secara berkala				
15.	Saya menaati tata tertib di kelas dan sekolah.				
16.	Saya mengikuti kegiatan upacara bendera.				
17.	Saya bermain kotor atau curang agar pendapat saya diterima orang lain.				
18.	Saya membela kebenaran, jika orang lain dinyatakan bersalah yang tidak terbukti kesalahannya.				
19.	Saya tidak dapat menyelesaikan masalah yang ada dalam diri saya.				
20.	Saya terlibat dalam hal pemecahan masalah yang ada di forum diskusi.				

21.	Saya menolong sesama jika ia sedang menghadapi masalah.				
22.	Saya menggunakan hak dan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Contoh : pemilihan ketua kelas, ketua osis, dll.				
23	Dalam melaksanakan tugas kelompok, saya melakukan dengan baik.				